

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATR

Edisi September | Tahun 2022 No. 40

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*KH. Aus Hidayat Nur*

*Maknai Perayaan HUT RI ke-77,*

**Bangsa Ini  
Harus Merdeka  
di Seluruh Lini  
Kehidupan**

# Pancasila Sebagai Karakter Bangsa



Bagaimana kita memaknai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini? Pancasila adalah dasar negara Indonesia merdeka. Diterima sebagai kesepakatan bersama (kalimatun sawa', common denominator ) oleh semua kelompok dan golongan di tubuh bangsa ini. Inilah kulminasi budaya luhur bangsa Indonesia yang digali bersama oleh tokoh-tokoh bangsa sehingga mencerminkan kualitas manusia Indonesia.

Jika ada pertanyaan apa karakter khas bangsa Indonesia? Jawabnya adalah Pancasila. Pancasila memberikan warna (corak) identitas/karakter Indonesia

sebagai sebuah bangsa. Pancasila sebagai falsafah dan norma dasar (ground norm) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (philosophische grondslag). Konsekuensinya, Pancasila selain menjadi identitas/karakter juga menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dalam bernegara.

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini keampuhan Pancasila sebagai "bintang pimpinan" (leitstar). Kata Bung Karno, Kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya

yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan Pancasila adalah satu membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa

yang cara berjuangnya sama. Lima sila dalam Pancasila diambil/disusun/disarikan dari nilai-nilai luhur yang ada dan berkembang dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Apa nilai-nilai identitas itu:

Pertama, Indonesia adalah bangsa yang religious (religious state). Apapun agamanya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religious. Indonesia memang bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara dan bangsa yang beragama. Kedua, karakter bangsa ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan universal, yang menghormati hak-hak kemanusiaan yang beradab.

Ketiga, walaupun Indonesia mempunyai keragaman, namun dalam setiap keragaman tersebut terdapat tununan dan jalinan yang saling mempertemukan satu dengan yang lainnya. Kita boleh berbeda. Ada elemen-elemen lokal, tetapi selalu ada benang merah yang menyatukan kita. Seperti itulah filosofi dari Bhineka Tunggal Ika.

Keempat, di seluruh Nusantara, bangsa ini memiliki tradisi musyawarah dalam segala urusan. Sila keempat dengan baik menggambarkan ciri khas demokrasi Indonesia. Empat unsur tersebut pada akhirnya kembali dipersatukan dengan cita-cita dan impian

untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dan akhirnya, di manapun kita berada, baik di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, atau lainnya, kita dipersatukan dengan impian masyarakat yang adil makmur, tentram raharja.

Pancasila dilahirkan dari pergulatan pemikiran tokoh tokoh pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Perdebatan konseptual rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan tiga hal:

Pertama, Pancasila menunjukkan kualitas pemikiran (isi kepala) bangsa kita. Bangsa dengan kebhinekaan yang besar harus dibangun dengan konsepsi yang kuat untuk menjaga kebesarannya. Tanpa konsepsi itu bangsa kita sudah lama tercerai berai dalam kesukuan dan kedaerahan.

Kedua, Pancasila menunjukkan kualitas peradaban bangsa Indonesia dengan karakternya yang unggul. Pun demikian, Pancasila sejatinya bukan saja milik bangsa Indonesia, tapi bisa diwariskan untuk dunia sebagaimana Pidato Bung Karno yang mengguncang dunia di Sidang Umum PBB 30 September 1960 tentang Pancasila ( To Build The World a New )

Ketiga, dan ini yang sangat penting, rumusan Pancasila menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati tokoh bangsa

untuk menjaga persatuan di atas semua kepentingan golongan.

Dengan refleksi atas lahirnya Pancasila tersebut, apa sikap dan perilaku kebangsaan yang tepat kita hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini?

Pertama, Pancasila telah final sebagai falsafah dan norma dasar beregara (dasar negara). Tugas kita mengokohkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menjadikan Pancasila milik bersama sebagai ideologi berbangsa dan bernegara yang terbuka. Seluruh warga negara aman dan nyaman mengekspresikan nilai nilai Pancasila. Ketiga, menjadikan Pancasila alat pemersatu, bukan alat pemecah-belah, segregasi, dan alienasi warga negara. Keempat, mengedepankan sikap toleransi (tasammuh), silaturahmi, kerjasama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Bangsa ini terlalu besar untuk dikelola sendirian, dan yang demikian tidak lah mungkin bisa dilakukan.

Kita meyakini jika Pancasila dipedomani sebagai dasar negara, bangsa Indonesia akan hidup dalam rukun dan harmonis serta terwujud cita-cita nasional: masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.



“Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, imperialisme

# Dr. Salim Bertemu Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, PKS dan TNI Komitmen Jaga NKRI

## KUTIPAN

Makassar (10/08) --- Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Aljufri dalam Program Dr. Salim Menyapa Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Silaturahmi dengan Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H, M.H (Senin, 8/8/2022).

Dr. Salim didampingi oleh Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin, Wakil Ketua DPRD Sulsel Muzayyin Arif, serta jajaran DPTW PKS Sulsel.

Dalam silaturahmi yang dikemas dengan jamuan makan malam di kediaman pribadi Pangdam, yaitu rumah perjuangan Para Raja pendahulunya, Andi Muhammad mengucapkan selamat datang kepada Dr. Salim di bumi para raja.

Andi sendiri adalah keturunan Raja Kerajaan Gowa yaitu cucu dari Raja Gowa Sultan Ibrahim Andi Mappanyukki.

Andi Muhammad banyak menjelaskan sejarah dan

silsilah kerajaan di Sulawesi dan kontribusinya bagi kemerdekaan Indonesia.

"Kerajaan-kerajaan inilah yang menjadi cikal bakal republik karena republik dulu tidak punya apa-apa. Para raja yang menyumbang materi hingga ikut berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Dr. Salim merasa berbahagia dapat bersilaturahmi dengan Pangdam sebagai bagian dari anak bangsa yang terus berkontribusi positif dalam menjaga NKRI dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. PKS sendiri terus

berkomitmen menjaga NKRI bersama TNI dan elemen bangsa lainnya.

"Terima kasih Mayjen TNI Andi Muhammad Panglima Kodam XIV/Hasanuddin yang telah mengundang kami dalam jamuan makan malam yang penuh berkah dan kekeluargaan ini. Hal ini menambah semangat kita semua sebagai anak bangsa untuk berkolaborasi menjaga NKRI. Saya pastikan seluruh kader PKS siap menjaga NKRI yang kita cintai bersama," ungkap Dr. Salim dalam sambutannya.

Menteri Sosial RI 2009-2014 ini mengapresiasi Panglima Kodam Hasanuddin sebagai putra daerah Sulawesi Selatan yang menjadi pucuk pimpinan TNI di Kodam Hasanuddin.

"Kebanggaan bagi masyarakat Sulsel, apalagi beliau bukan orang sembarangan, adalah cucu dari Raja Gowa Sultan Ibrahim Andi Mappanyukki. Tentu patriotisme dalam menjaga NKRI telah terpatri turun temurun dari moyang beliau dan sekarang beliau mengabdikan di TNI yang sangat kita banggakan," kata Salim.



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

“Kebanggaan bagi masyarakat Sulsel, apalagi beliau bukan orang sembarangan, adalah cucu dari Raja Gowa Sultan Ibrahim Andi Mappanyukki. Tentu patriotisme dalam menjaga NKRI telah terpatri turun temurun dari moyang beliau dan sekarang beliau mengabdikan di TNI yang sangat kita banggakan”

# Dr. Salim: Kita Ingin Kemenangan yang Penuh Keberkahan

## KUTIPAN

Makassar (07/08) — PKS bertekad untuk meraih kemenangan yang penuh dengan keberkahan di Sulawesi Selatan. Demikian disampaikan Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim dalam temu ribuan anggota PKS di Ballroom Clarion Makassar, minggu 7 Agustus 2022.

Pesan yang disampaikan oleh Dr. Salim disambut antusias oleh anggota PKS yang datang dari seluruh penjuru Sulsel.

"Saya ingin menyampaikan syarat menuju kemenangan ada tiga tahapan yang kita persiapkan. Pertama, adanya Keinginan untuk menang, kedua kita siapkan strategi kemenangan dengan baik dan ketiga bangun citra positif bahwa PKS adalah milik kita semua," jelas Salim.

Menteri Sosial 2009-2014 ini menceritakan filosofi semut untuk memenangkan PKS.

"Saya berharap kita mempelajari filosofi semut, dalam bekerja sama dan menyikapi

kehidupan. Semut selalu bekerja keras dan saling tolong menolong, baik dalam mencari makanan maupun membangun tempat tinggal, kehidupan semut ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua," terang Salim.

Duta Besar untuk Kerajaan Saudi Arabia 2005-2009, menyampaikan pesan-pesan yang penuh dengan energi positif dihadapan ribuan anggota PKS.

"Kemenangan PKS harus didasari kepada ridho dari Allah SWT, kemenangan yang akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga PKS akan selalu ada di hati dan dicintai oleh masyarakat," tutup Salim.



## Dr. SALIM

Ketua Majelis Syuro PKS

"Saya berharap kita mempelajari filosofi semut, dalam bekerja sama dan menyikapi kehidupan. Semut selalu bekerja keras dan saling tolong menolong, baik dalam mencari makanan maupun membangun tempat tinggal, kehidupan semut ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua"

# Dr. Salim Peroleh Gelar I Waliuddin Karaeng Manaba di Sulsel

## KUTIPAN

Kabupaten Maros (08/08) --- Ketua Majelis Syura PKS Habib Dr. Salim Segaf Aljufri mendapatkan gelar I Waliuddin Karaeng Manaba dari Kekaraengan (Kerajaan) Marusu di Istana Balla' Lampa Maros Sulawesi Selatan pada Senin (8/8/2022).

Gelar ini diberikan bersamaan dengan kunjungan Dr. Salim ke Sulsel dalam Program Dr. Salim Menyapa Indonesia.

Prosesi penganugerahan gelar diawali 23 pasukan berkuda yang mengiringi perjalanan Dr. Salim ke Balla Lampa. Tari Padduppa disusun tabuhan gendang menyambut kedatangan Dr. Salim. Gelar diberikan langsung oleh Pemegang Amanah Raja Ke-24 Kerajaan Adat Marusu, yang juga Pemangku Adat Karaeng Marusu Ke-6, Yang Mulia Drs. Andi Abdul Waris Tajuddin Karaeng Sioja, S.St., M.Pd.

I Waliuddin Karaeng Manaba sendiri adalah gelar kebangsawanan terhormat di kalangan suku Makassar, Bugis,

Mandar, Tana Toraja (Tator) dan Selayar. Makna keseluruhannya adalah sosok bangsawan tinggi yang ramah, memasyarakat, peduli, peka, berpengetahuan luas dan senantiasa teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan kebaikan.

Dalam sambutannya Menteri Sosial RI 2009-2014 ini menyatakan apresiasi dan kebanggaannya menjadi keluarga besar Kerajaan Marusu.

"Suatu kehormatan dan kebanggaan saya diterima sebagai keluarga besar Kerajaan Marusu di Maros sehingga semua yang ada di sini adalah keluarga saya dan sebagai keluarga tentu saling menjaga dan memuliakan," ungkap Dr. Salim.

Indonesia, menurutnya, kaya sekali dengan budaya dan adat istiadat maka pemajuan budaya bangsa adalah keniscayaan dan menjadi tugas para pemimpin bangsa.

"Budaya inilah yang mengokohkan karakter bangsa Indonesia bahkan Pancasila sendiri lima silanya ada puncak-puncak kebudayaan dari berbagai daerah," ungkap Salim.

Sebagai Ketua Majelis Syura PKS dirinya selalu berpesan kepada para kader dan pejabat publik PKS agar menghormati dan melestarikan budaya daerah. Sering-sering bersilaturahmi dan berinteraksi dengan para ketua adat apalagi dengan penerus kerajaan. Mulailah mereka dan minta nasehat untuk kemajuan masyarakat bangsa dan negara.

"Kerajaan di berbagai daerah telah ada sebelum Indonesia lahir. Mereka berjuang melawan penjajahan sehingga terwujud kemerdekaan di bumi nusantara. Maka kerajaan-kerajaan nusantara adalah bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang harus dihormati dan dijaga



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syura PKS

"Suatu kehormatan dan kebanggaan saya diterima sebagai keluarga besar Kerajaan Marusu di Maros sehingga semua yang ada di sini adalah keluarga saya dan sebagai keluarga tentu saling menjaga dan memuliakan,"

keberadaannya," tandasnya.

Sebelumnya Dr. Salim juga menerima gelar Dato Wira Cahaya Buana oleh Lembaga Adat Melayu di Kabupaten

Bintan. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Yang Mulia Datuan Satria Negara dari Masyarakat Adat Lampung.

# Orasi Kebangsaan di Sulsel, Dr. Salim **Ada Titik Temu** Perbedaan antar Anak Bangsa

## KUTIPAN

Makassar (10/08) --- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan menyelenggarakan acara dialog kebangsaan di Hotel Claro Selasa, (9/8/2022).

Ketua Majelis Syura PKS, Dr. Salim Segaf Aljufri hadir memberikan orasi kebangsaan yang dipimpin Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin, dan Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid, SP

Acara dialog kebangsaan itu merupakan rangkaian Program Dr. Salim Menyapa Indonesia di Sulawesi Selatan. Tujuannya mengokohkan semangat transformasi dan kolaborasi antar elemen bangsa, untuk menjawab berbagai persoalan negeri dan memajukan Indonesia.

Dr. Salim mengatakan bahagia bisa bertemu dan berdialog dengan Gubernur Sulsel, para akademisi, seniman, tokoh lintas agama hingga pengusaha yang

kesemuanya adalah elemen bangsa.

Dr. Salim menekankan pada tiga hal penting untuk diwujudkan dimana pun berada yaitu, sepakat untuk cinta pada NKRI yang dilandasi dengan kekuatan niat, sepakat menjaga dan mempertahankan NKRI, serta sepakat bersama mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Ke tiga hal ini harus diwujudkan, apakah kita sebagai eksekutif atau anggota dewan dimana pun kita berada, apakah sebagai tokoh agama, semua harus bersepakat bagaimana kita mewujudkan cita-cita pendiri bangsa," kata Dr. Salim.

Selama empat hari di Sulsel, Dr. Salim mendapat hal luar biasa berkaitan dengan

'local wisdom', yang merupakan kaya falsafah terutama ketika ia mendapatkan gelar Waliuddin Karaeng Manaba. Dr. Salim mengatakan bersyukur dan bangga membawa gelar itu untuk mewujudkan makna gelar tersebut.

"Saat mendapat gelar tersebut, saya tidak berbangga-bangga, justru banyak muatan lokal di dalamnya perlu digali. Tidak hanya disini, kita pun bisa dapatkan di seluruh negeri. Seperti di Sulteng dengan bahasa Kaili nya yang artinya, jika kamu berbuat baik, kebaikan pula yang akan kamu dapatkan," bebernya.

Menurutnya ada beberapa ungkapan indah dan mengganggap sebagai obat penenang seperti 'sipakatau, sipakalebbi, sipakatuo, sipakainge'. Jika diterjemahkan menjadi saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling mengingatkan yang perlu dipertahankan sehingga bukan retorika semata, namun harus diwujudkan.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Ada beberapa ungkapan indah dan mengganggap sebagai obat penenang seperti 'sipakatau, sipakalebbi, sipakatuo, sipakainge'. Jika diterjemahkan menjadi saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling mengingatkan yang perlu dipertahankan sehingga bukan retorika semata, namun harus diwujudkan.



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI





# Wakil Ketua FPKS Tegaskan Penolakan Wacana Kembalinya Dwi Fungsi TNI

## KUTIPAN

Jakarta (11/08) --- Wacana pempatan tentara aktif di jabatan sipil kembali muncul ketika Revisi Undang-Undang TNI masuk dalam daftar Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta menyatakan menolak kembalinya dwi fungsi TNI.

"Wacana kembalinya dwi fungsi TNI bukanlah latarbelakang revisi UU TNI namun revisi ini sebagai upaya perbaikan TNI dan peningkatan pola koordinasi, pembagian tugas yang jelas antara TNI dan POLRI serta memperjelas tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang. Tujuannya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia," ungkapnya.

Permasalahan menumpuknya ratusan Perwira TNI, lanjut Sukamta, merupakan masalah lama dalam tata kelola manajemen perencanaan TNI yang belum optimal akibatnya banyak yang tidak mendapatkan jabatan.

"Salah satunya jumlah

rekrutmen sekolah staf dan komando militer di tiga matra tidak didasarkan pada kebutuhan dan rencana penempatan. Apalagi saat ini batas atas pensiun menjadi 58 tahun akibatnya semakin menambah jumlah perwira TNI aktif. Padahal jumlah jabatan khusus TNI yang disediakan pemerintah hanya 60an. Maka dari itu perbaikan manajemen dan tata kelola perencanaan TNI harus dilakukan dengan baik," jelas Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menyatakan masalah yang akan timbul ketika TNI kembali lagi menjabat di jabatan sipil.

"Wacana penempatan TNI

di jabatan sipil bisa mengembalikan dwi fungsi TNI zaman orde baru yang menimbulkan banyak masalah. Pertama, jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi teknis ataupun keilmuan bukan bagi-bagi jabatan," pungkasnya.

Kedua, imbuah Sukamta, budaya demokrasi dan profesional dalam lembaga publik akan berubah menjadi militeristik karena tentara terbiasa dengan sistem komando akibatnya kritik atau saran dari masyarakat dan perbaikan terhambat.

"Ketiga, pola hubungan senior dengan junior menghambat akuntabilitas dan transparansi lembaga dan pejabat publik," sebut Sukamta.

Doktor lulusan Inggris ini memberikan solusi lain yang sesuai dengan UU TNI.

"Jika tentara ingin masuk ke lembaga pemerintah maka harus mengundurkan diri atau sudah pensiun. Tentara bisa mengikuti seleksi terbuka jabatan publik sehingga tidak ada konflik kepentingan dan benar-benar di uji kompetensinya bersaing dengan masyarakat sipil. Dasarnya kompetensi bukan dengan bagi-



## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

"Jika tentara ingin masuk ke lembaga pemerintah maka harus mengundurkan diri atau sudah pensiun. Tentara bisa mengikuti seleksi terbuka jabatan publik sehingga tidak ada konflik kepentingan dan benar-benar di uji kompetensinya bersaing dengan masyarakat sipil. Dasarnya kompetensi bukan dengan bagi-bagi jabatan yang bisa merugikan publik,"

bagi jabatan yang bisa merugikan publik," tandasnya.

Sukamta mengingatkan sejarah orde baru dan kejadian beberapa waktu lalu ketika Ombudsman RI sudah menyatakan bahwa penunjukan

perwira TNI sebagai pejabat kepala daerah menyalahi UU TNI dan UU Aparatur Sipil Negara.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Kekosongan Kursi MenPAN-RB

# Aleg PKS Desak Presiden Cepat Cari Pengganti

● KUTIPAN

Jakarta (10/08) --- Anggota FPKS DPR RI Komisi II, Mardani Ali Sera menyoroti kekosongan yang terjadi pada kursi MenPAN-RB yang sampai saat ini belum diisi oleh siapapun. Hal tersebut dikemukakan Mardani dalam cuitan di akun twitter pribadinya pada (10/08/2022).

Menurut Mardani, presiden perlu untuk dapat mencari nama pengganti kursi MenPAN-RB secepat mungkin guna kekosongan yang terjadi tidak berimbas pada segala proses mekanisme kinerja dari kementerian itu sendiri.

“Satu bulan sebenarnya waktu terlalu lama untuk mengisi kekosongan. Karena setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya. Pak @jokowi mesti mencari yg terbaik, tidak harus dari partai karena reformasi birokrasi merupakan satu dari 5 program utama pak @jokowi.” Ujar Mardani.

Melihat hal ini pula,

Mardani mengatakan bahwa nama yang nantinya ditunjuk oleh pemerintah harus bisa memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengisi jabatan strategis tersebut. Mengingat, integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi satu hal yang utama yang perlu terus ada.

“Sebagai ‘Bapak ASN’, Menpan RB perlu memiliki keahlian, komitmen yang tinggi serta integritas yg tidak diragukan lagi. Terlebih, 2022 sudah masuk tahun politik menjelang Pemilu 2024.” imbuhnya.

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

“Satu bulan sebenarnya waktu terlalu lama untuk mengisi kekosongan. Karena setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya. Pak @jokowi mesti mencari yg terbaik, tidak harus dari partai karena reformasi birokrasi merupakan satu dari 5 program utama pak @jokowi.”

Terkait Pembubaran  
Satgassus Polri

## Habib Aboe : Bentuk **Keseriusan** **Kapolri** Tuntaskan Kasus FS

### KUTIPAN

Jakarta (12/08) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy menanggapi pembubaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri yang dipimpin Irjen Ferdi Sambo.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, pembubaran Satgassus oleh Kapolri adalah langkah tepat untuk saat ini. Setidaknya, agar FS bisa fokus dalam menghadapi perkara yang dihadapi.

"Karena sesuai dengan Surat Perintah (Sprin) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan nomor: Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022 yang diteken 1 Juli 2022, satgassus ini dipimpin oleh FS," sebut Sekjen DPP PKS ini.

Langkah Kapolri, kata Habib Aboe, akan membuat Timsus akan semakin luasa menjalankan tugas dalam

penyelidikan maupun penyidikan kematian Brigadir J.

"Disisi lain langkah ini menunjukkan keseriusan Kapolri untuk mengungkap perkara ini secara clear. Selain itu menunjukkan kepada publik bahwa Polri benar benar ingin melakukan langkah pro justicia untuk semua kalangan," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.



### HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

“Pembubaran Satgassus oleh Kapolri adalah langkah tepat untuk saat ini. Setidaknya, agar FS bisa fokus dalam menghadapi perkara yang dihadapi. Karena sesuai dengan Surat Perintah (Sprin) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan nomor: Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022 yang diteken 1 Juli 2022, satgassus ini dipimpin oleh FS



# Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, **Aleg PKS: Faktanya Petani Tak Sejahtera, Logikanya Dimana?**

## KUTIPAN

Jakarta (18/08) — Dalam pidato Kenegaraan sidang tahunan MPR RI dan DPR RI dalam rangka HUT ke-77 RI, Presiden Jokowi menyinggung soal prestasi tidak impor beras konsumsi dalam tiga tahun terakhir

sehingga mendapat penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras. Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet mengatakan bahwa sebenarnya Pemerintah tidak benar-benar tanpa impor karena berdasarkan data BPS dalam tiga tahun terakhir sejak 2019 ada impor sekitar 400 ribu ton atau senilai 2,5 triliun rupiah per tahun.

Selanjutnya, Slamet menegaskan bahwa kondisi ini justru membuat khawatir karena dalam posisi 3 tahun tanpa impor tetapi

kesejahteraan petani beras justru terpuruk.

"Ini aneh dan mengkhawatirkan. Pertanyaan yang wajar muncul adalah Bagaimana nanti bila ada impor? dalam keadaan tanpa impor saja petani beras terpuruk, kok bisa?," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Nilai Tukar Petani (NTP) Umum pada akhir tahun 2021 berada pada angka 104,64 mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2019 (100,5) dan tahun 2020 (101,68). Namun jika kita bedah angka NTP 104,64 itu yang menjadi kontributor terbesar adalah NTP Perkebunan sebesar 120,97,

sedangkan NTP Pangan (beras) menjadi kontributor terendah yaitu 98,21.

"Selain itu jika kita cermati NTP Umum inipun pernah kita capai angka 105,24 di tahun 2012, namun setelah itu turun hingga 100,5 di tahun 2019 dan naik lagi tertinggi di tahun 2021 sebesar 104,64," ujarnya di Jakarta (18/08)

Ini artinya kesejahteraan petani yang direpresentasikan melalui nilai NTP tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah dalam kondisi terus menanjak tapi selalu berfluktuasi. Artinya kesejahteraan petani tidak menentu dari tahun ke tahun.

"Menurut saya ini ada persoalan besar yang tidak mampu diselesaikan pemerintah hingga saat ini," ujarnya.

Slamet menekankan, jika keberhasilan swasembada beras tidak diikuti dengan peningkatan signifikan NTP Pangan, maka artinya swasembada itu bukan berasal dari petani dan lahan petani yang sudah ada saat ini, tetapi bisa jadi berasal dari penurunan konsumsi beras ke



**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI

"Jika keberhasilan swasembada beras tidak diikuti dengan peningkatan signifikan NTP Pangan, maka artinya swasembada itu bukan berasal dari petani dan lahan petani yang sudah ada saat ini, tetapi bisa jadi berasal dari penurunan konsumsi beras ke bentuk lain misalnya gandum. "

bentuk lain misalnya gandum.

Diversifikasi konsumsi itu baik tapi jika diversifikasinya ke pangan yang berasal dari impor (gandum) ini bunuh diri namanya, kita akan terus tergantung pasokan dari luar. Kita berhasil swasembada beras tapi kita menuju menjadi negara pengimpor gandum. Dimana akal sehatnya?

ditambah lagi saat ini gandum langka dan mahal harganya.

"Ini akan menjadi bom waktu bagi kematian Petani dan lahan pertanian Indonesia, atau dengan arti lain Pemerintah ingin lepas tangan dari tugas mensejahterakan petani dan lahan yang sudah ada," pungkasnya.

# Harga Tiket Pesawat Naik, Aleg PKS: Pemerintah Perlu Kurangi Pajak untuk Turunkan Harga Tiket Pesawat

## KUTIPAN

Jakarta (08/08) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menetapkan KM 142 Tahun 2022 tentang Besaran Biaya Tambahan atau (Surcharge)

yang disebabkan adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri yang akan berlaku mulai 4 Agustus 2022.

Terbitnya ketentuan tersebut diprediksi dapat menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat karena Kemenhub memperbolehkan maskapai menaikkan harga tiket maksimal 15% dari tarif batas atas (TBA) untuk pesawat jenis jet dan maksimal 25% dari TBA untuk pesawat jenis propeller. Kenaikan ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) bulan penera-

pan besaran biaya tambahan (surcharge) oleh maskapai.

Kemenhub mengambil keputusan ini karena adanya kenaikan harga avtur atau bahan bakar pesawat sehingga perlu menetapkan kebijakan ini agar maskapai mempunyai pedoman dalam menerapkan tarif penumpang. Meskipun demikian, Kemenhub menghimbau kepada seluruh Badan Usaha Angkutan Udara atau maskapai yang melayani rute penerbangan berjadwal dalam negeri, untuk dapat menerapkan tarif penumpang yang lebih terjangkau oleh pengguna jasa penerbangan.

Anggota DPR RI Komisi V

dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama berpandangan bahwa Kemenhub belum serius dalam memperbaiki sektor transportasi yang baru saja bangkit setelah terkena dampak pandemi.

"Bagaimana mungkin Kemenhub mengharapkan maskapai untuk menerapkan tarif yang terjangkau oleh pengguna jasa penerbangan, tetapi di sisi lain Kemenhub juga menerbitkan ketentuan yang memperbolehkan maskapai untuk menaikkan harga tiket," tegas Suryadi.

"Kami (Fraksi PKS) mengingatkan bahwa BPS mencatat inflasi bulan Mei disumbang salah satunya dari tarif angkutan udara. Secara umum, sektor transportasi menyumbang 0,08% terhadap inflasi, kedua tertinggi setelah sektor makanan, minuman dan tembakau," sambungya.

Suryadi berpandangan bahwa dalam menghadapi kenaikan harga avtur yang terjadi saat ini perlu memerhatikan sektor



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.**  
Anggota Komisi V DPR RI

"Kami (Fraksi PKS) mengingatkan bahwa BPS mencatat inflasi bulan Mei disumbang salah satunya dari tarif angkutan udara.

Secara umum, sektor transportasi menyumbang 0,08% terhadap inflasi, kedua tertinggi setelah sektor makanan, minuman dan tembakau,"

transportasi udara yang di dalamnya terdapat tiga pihak yang sama-sama berkepentingan, yaitu penumpang sebagai pengguna jasa transportasi memiliki kepentingan atas harga tiket yang murah, maskapai sebagai penyedia jasa transportasi

memiliki kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari jasanya dan Pemerintah sebagai regulator juga memiliki kepentingan atas adanya penerimaan pajak dan lain lain.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Aleg PKS Minta Aturan Transportasi Ojek Online Tingkatkan Hubungan Kemitraan

## KUTIPAN

Tasikmalaya (12/08) -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat menyambut baik terbitnya regulasi terbaru yang mengatur tarif ojek daring (online),

yang dituangkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggumbara Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

"Aturan tarif ojek online yang baru saja dirilis oleh Kemenhub (8/8/2022) merupakan hal yang dinantikan oleh para driver. Pasalnya belakangan ini potongan dari perusahaan sangat besar, hal ini dikeluhkan oleh mereka. Jika perjanjian sebelumnya (potongan tarif) 20 persen, belakangan diatas 20 persen. Mereka minta disesuaikan," ujar Politisi PKS.

Para driver menyebutkan customer menyangka ojek online dapat penghasilan besar,

sesungguhnya kecil, tambah Toriq, sebagaimana info yang ia dapatkan. Dengan adanya kebijakan baru ini Dia berharap Perusahaan Aplikasi segera mematuhi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak keputusan menteri ini ditetapkan.

"Namun regulasi ini hanya baru menyentuh kuantitas profit saja. Belum mengarah kepada peningkatan kualitas kemitraan. Tidak heran jika ada oknum perusahaan Aplikasi di zona tertentu yang tiba-tiba menaikkan potongan terhadap driver," ujarnya.

Menurut Toriq, Kemitraan sesungguhnya adalah hubungan kerjasama yang setara dan adil antara dua pihak atau lebih yang berlandaskan prinsip saling

menguntungkan, memerlukan, memperkuat dan mempercayai.

"Driver Online diklasifikasikan sebagai 'mitra' oleh perusahaan aplikasi namun berdasarkan penelitian lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia, kondisinya jauh berbeda. Status 'mitra' hanya dimanfaatkan untuk menghindari memberi pengojek online jaminan upah minimum, jaminan kesehatan, pesangon, upah lembur, hak libur, hingga jam kerja layak," sebutnya.

Oleh karenanya Toriq sangat berharap agar Pemerintah online jaminan upah minimum, juga memperhatikan kondisi hidup layak para driver online. Pada 2019, sebuah perusahaan platform ojek dari berkontribusi untuk ekonomi Indonesia mencapai Rp. 103 triliun. Nyaris 1% dari PDB.

"Sudah sepatutnya Pemerintah memberikan perhatian khusus untuk driver," tutup Toriq.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

"Driver Online diklasifikasikan sebagai 'mitra' oleh perusahaan aplikasi namun berdasarkan penelitian lembaga pendidikan terkemuka di Indonesia, kondisinya jauh berbeda. Status 'mitra' hanya dimanfaatkan untuk menghindari memberi pengojek online jaminan upah minimum, jaminan kesehatan, pesangon, upah lembur, hak libur, hingga jam kerja layak,"



# *Mari Tetap Kenakan Masker*

# Aleg PKS Dorong DPR Segera **Realisasikan** Pansus Hak Angket Kereta Cepat Jakarta - Bandung

## KUTIPAN

Jakarta (08/08) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina berupaya merealisasikan Usulan Pembentukan Pansus Kereta Api Cepat.

Menurutnya, sejak awal Fraksi PKS DPR-RI menolak proyek KCJB ini dibiayai oleh APBN, namun seiring berjalannya waktu, pemerintah terus menguras APBN demi proyek ini.

Nevi mengatakan, Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukan proyek infrastruktur dasar. Dalam perjalanan proyek ini, terjadi cost over run sampai Rp 27 triliun, sehingga biayanya membengkak menjadi Rp 114 triliun. Angka ini juga belum tentu telah final. Masih sangat mungkin bengkak lagi.

"Pembengkakan biaya kereta cepat ini dapat menyebabkan BUMN terpesok dalam jerat utang", tutur Anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN ini.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan, Fraksi PKS telah meminta PMN terkait

kereta cepat ini ditunda sampai ada kejelasan berbagai kajian secara komprehensif yang hasilnya dipublikasikan secara luas di masyarakat. KCJB pada awalnya tidak menggunakan Dana APBN (Perpres No. 107 Tahun 2015).

Namun pada kenyataannya, lanjutnya, hingga saat ini pemerintah didesak untuk menggelontorkan dana APBN melalui Peraturan Presiden (PERPRES) No. 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Adanya perubahan ini menunjukkan adanya ketidakmatangan dalam perencanaan dan ketidakkonsistenan pemerintah terhadap proyek tersebut.

Nevi menerangkan, PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp4,1 triliun tersebut, tentunya akan menjadi beban berat bagi keuangan negara. Apalagi saat ini, kondisi ekonomi global penuh dengan ketidakpastian. Pemerintah sendiri sudah melakukan revisi terhadap APBN 2022, akibat terjadinya disrupsi supply disrupsi sisi produksi atau supply shock yang sangat besar sehingga mendorong kenaikan ekstrem harga-harga komoditas global.

"Apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memicu inflasi tinggi. Bisa dipastikan anggaran penyelesaian proyek KCJB ini juga akan turut membengkak. Dengan berbagai alasan inilah, saya akan berupaya bersama teman-teman fraksi PKS dan berbagai fraksi yang memiliki pandangan yang sama, dengan tujuan demi menyelamatkan keuangan negara yang pada ujungnya menyelamatkan roda pemerintahan, maka hak angket kereta cepat ini mesti di realisasi secepatnya", tutup Nevi Zuairina tegas.



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memicu inflasi tinggi. Bisa dipastikan anggaran penyelesaian proyek KCJB ini juga akan turut membengkak. Dengan berbagai alasan inilah, saya akan berupaya bersama teman-teman fraksi PKS dan berbagai fraksi yang memiliki pandangan yang sama, dengan tujuan demi menyelamatkan keuangan negara yang pada ujungnya menyelamatkan roda pemerintahan, maka hak angket kereta cepat ini mesti di realisasi secepatnya."



# Anggota FPKS: Inflasi Tinggi Berpotensi Turunkan Level Ekonomi 67% Rakyat

**KUTIPAN**

Jakarta (12/08) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mewanti-wanti pemerintah agar mengendalikan angka inflasi yang menembus 4,94% (year on year/yoj) pada Juli tahun ini.

Lonjakan inflasi bisa menggerus pendapatan kelompok menengah dan berpotensi menurunkan level ekonomi golongan menengah yang rentan miskin.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 67 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk kategori rentan miskin. Mereka adalah kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah.

"Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin

menjadi miskin," beber Amin.

Menurut Amin, potensi penurunan timbul karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan mayoritas kelas menengah. Hal itu tercermin dari rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya 1,09% dalam dua tahun terakhir.

"Idealnya UMP harus menyesuaikan inflasi untuk mengimbangi turunnya nilai uang akibat inflasi. Jika tidak, maka daya beli masyarakat akan terus turun," tegasnya.

Penurunan daya beli masyarakat akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, tahun 2021 lalu, konsumsi masyarakat atau pengeluaran rumah tangga

mencapai Rp 9,24 kuadriliun atau berkontribusi sebesar 54,42% dari total PDB yang mencapai Rp 16,97 kuadriliun.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu pun mewanti-wanti pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Daripada mengalokasikan dana APBN untuk membiaya

pembengkakan biaya proyek kereta cepat, ataupun pembangunan ibukota negara lebih baik untuk mempertahankan subsidi BBM. Amin khawatir, kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah daerah beberapa hari terakhir merupakan indikasi Pemerintah akan mencabut subsidi atau tidak lagi memproduksi BBM jenis tersebut.

"Mengendalikan inflasi, menyubsidi rakyat miskin dan rentan miskin, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting," kata Amin.



**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Potensi penurunan timbul karena kenaikan harga-harga kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan mayoritas kelas menengah. Hal itu tercermin dari rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya 1,09% dalam dua tahun terakhir. Idealnya UMP harus menyesuaikan inflasi untuk mengimbangi turunnya nilai uang akibat inflasi. Jika tidak, maka daya beli masyarakat akan terus turun"

# Wakil Ketua FPKS: Stop Proyek IKN dan Kereta Cepat, **Alihkan** ke Subsidi BBM

## KUTIPAN

Jakarta (08/08) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mendesak Pemerintah menambah kuota subsidi BBM jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 daripada meneruskan proyek IKN dan kereta cepat Jakarta-Padalarang.

Hingga saat ini, kata Mulyanto, kuota BBM subsidi terancam habis di bulan Oktober-November mendatang.

Menurutnya ketersediaan BBM subsidi dalam jumlah yang cukup lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang dua proyek tersebut.

"Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun," jelas Mulyanto.

Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu, tegas Mulyanto, segera

putuskan untuk disetop saja.

"Misalnya proyek ibu kota negara baru kalau gak urgent ya hentikan. Juga proyek Kereta Cepat kenapa harus tergesa-gesa gitu," ujarnya.

Mulyanto menambahkan, program subsidi BBM merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketahanan energi nasional. Apalagi, saat ini, masyarakat tengah dihadapkan pada masalah kenaikan berbagai jenis bahan pangan atau sembako.

"Jadi, pilih yang tepat untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Itu prioritaskan,"

tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali mengingatkan jika kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite maupun Solar untuk tahun 2022 berpotensi habis antara Oktober dan November mendatang. Menyusul, rasio penyaluran Pertalite dan Solar telah mencapai 50 persen lebih dari kuota yang ditetapkan pemerintah di 2022.

BPH Migas mencatat, volume penyaluran BBM subsidi jenis Solar mencapai 8,3 juta kilo liter (KL) hingga Juni 2022. Sementara kuota solar subsidi dipatok sebesar 14,9 juta KL. Adapun, realisasi penyaluran Pertalite per Juni sudah menembus 14,2 juta KL. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 23 juta KL.



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

"Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari Rp 152,2 triliun menjadi Rp 502,4 triliun,"

## Pasokan Batubara ke PLN Turun

# Aleg PKS Minta Pemerintah Amankan Kebijakan DMO

### KUTIPAN

Jakarta (11/08) — Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari meminta pemerintah mereview kebijakan terkait penegakkan sanksi kepada perusahaan batubara yang tidak mentaati aturan pemerintah dalam hal kewajiban memenuhi Domestic Market Obligation (DMO).

Ditengah kondisi tingginya ekspor batubara yang dilakukan oleh para pengusaha Indonesia, terdapat ancaman kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Ketersediaan batu bara sebagai bahan utama dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mengalami ancaman kekurangan ketersediaan stok batubara," pungkasnya.

Hal tersebut, kata Diah, disebabkan oleh rendahnya kontribusi perusahaan batubara dalam melaksanakan kewajiban mereka menyediakan kebutuhan domestik (DMO), dalam hal ini untuk kebutuhan PLN.

Dalam kesempatan berbicara, Diah Nurwitasari menyanjikan kepada Pemerintah, dalam hal ini

Kemen ESDM RI dan PLN.

"Sebenarnya berapa sih cadangan batubara PLN hari ini? Saya ingin mengetahui kondisi detailnya seperti apa, apakah dalam kondisi aman atau seperti apa?", tanya Politisi PKS tersebut.

Komis VII DPR RI Bersama Menteri ESDM RI melaksanakan rapat kerja mendadak di tengah masa reses untuk membahas dan mendiskusikan terkait permasalahan tersebut.

Dalam pembukaan rapat, Ketua Komisi VII DPR RI mengatakan bahwa agenda pembahasan mengenai progress realisasi entitas khusus batubara, dan serta strategi kebijakan pemenuhan DMO.

Aleg Fraksi PKS tersebut

mempertanyakan terkait implementasi dari strategi pemenuhan DMO yang sudah berjalan.

"Strategi pemenuhan DMO secara konsep sudah cukup baik menurut saya, namun implementasinya yang kemudian menjadi persoalan. Tentu Ketika implementasinya tidak baik, maka hasilnya pun demikian.", ungkap Aleg DPR RI Dapil Jabar II tersebut.

Menteri ESDM RI dalam paparannya mengatakan bahwa perusahaan cenderung memilih ekspor dibandingkan memasok batubara ke dalam negeri arena adanya disparitas harga yang signifikan.

"Dimana hal tersebut menimbulkan potensi industri dalam negeri akan mengalami kekurangan ketersediaan stok batubara. Selain itu disampaikan juga bahwa perusahaan lebih cenderung memilih bayar denda kompensasi karena tarif yang relatif kecil," jelas Diah.

Politisi yang akrab dipanggil Teh Diah itu mempertanyakan efektivitas dari denda kompensasi yang telah dilakukan tersebut.

Diah juga menyampaikan bahwa terkait penegakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar harus dipastikan.



Dipl.Ing. Hj. **DIAH NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Saya kira kita perlu juga me-review kembali terkait royalty progressive batubara yang sudah ada. Kedepan kita perlu ada tambahan layer Ketika batubara misal diatas \$200 atau lainnya, bagaimana kebijakannya,"

Disebutkan bahwa perusahaan yang melanggar aturan dikenakan sanksi pemblokiran fitur eksportnya.

"Apa benar sudah di blokir fitur eksportnya? Jangan sampai perusahaan lain yang taat aturan mendapat sanksi lain karena ulah perusahaan-perusahaan yang melanggar

aturan tersebut," tandasnya.

Di akhir penyampaian, Wakil Rakyat dari Kab Bandung – Kab Bandung Barat tersebut menegaskan bahwa meskipun payung hukum belum ada, kita tetap harus mampu mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

# Presiden Tak Usulkan Kenaikan BBM dalam RAPBN 2023, Aleg FPKS: Sudah Tepat!

## KUTIPAN

Jakarta (18/08) --- Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto menilai, Presiden memang sudah seharusnya tidak menaikkan harga BBM.

Hal itu dia sampaikan mengomentari pidato pengantar RAPBN 2023, dimana Presiden tidak mengusulkan kenaikan BBM yang selama ini menjadi perbincangan publik.

"Presiden memang seharusnya tidak menaikkan BBM karena sudah ada bantuan yang disiapkan yaitu subsidi dan dana kompensasi yang sudah ditambah di tahun 2022 ini," kata Rofik Hananto yang juga Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Rofik menambahkan, asumsi ICP di APBN 2022 juga sudah direvisi menjadi USD 100 per barel sebagaiantisipasi atas kenaikan komoditi energi di pasar dunia yang memang kondisinya secara ekonomi

maupun geopolitik sangat mempengaruhi harga energi.

"Kesepakatan tambahan ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan disetujui DPR," jelas Legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 ini.

Apalagi kondisi saat ini, menurut Rofik, harga minyak mentah di pasar dunia sudah mulai turun, yaitu sekitar USD 90 per barel. Terjadi penurunan sebesar 30% selama dua bulan terakhir. Bahkan ini sudah di bawah dari harga minyak mentah sebelum perang Rusia dan Ukraina.

"Jadi tidak ada alasan bagi Presiden untuk menaikkan BBM," tegasnya.

Rofik mengakui, anggaran subsidi 2023 meningkat

dibanding 2022 yang sudah mencapai Rp 502 triliun, dan mayoritas digunakan untuk menyubsidi energi.

"Anggaran sebesar Rp 502 triliun itu kan sebenarnya terlihat besar karena sebagianya adalah untuk membayar utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN, berupa dana kompensasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan berupa subsidi saja," katanya.

Sementara alokasi subsidi dari sebagian anggaran Rp 502 triliun itu adalah karena antisipasi asumsi ICP yang naik menjadi USD 100 per barel.

Kalau saja pemerintah sebelumnya konsisten membayar dana kompensasi tersebut sesuai tahun anggarannya, tentu tidak akan sebesar 502 triliun itu. Kasihan itu Pertamina dan PLN yang selama ini menanggung arus kas yang berat karena keterlambatan pemerintah membayar dana kompensasi," ujarnya.

Pemerintah sendiri di tahun 2023 masih akan tetap memberikan subsidi energi dan kompensasi BBM, listrik, dan LPG 3 kg yaitu sebesar Rp 336,7 triliun yang terdiri dari subsidi sebesar Rp 210,7 triliun dan dana kompensasi Rp 126,0 triliun.

"Ini saya kira wajar untuk mengantisipasi fluktuasi harga energi yang akan meningkat di tahun 2023, seiring peningkatan permintaan energi karena pulihnya ekonom dunia dari wabah pandemi," katanya.



**H. ROFIK HANANTO, S.E**  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Kalau saja pemerintah sebelumnya konsisten membayar dana kompensasi tersebut sesuai tahun anggarannya, tentu tidak akan sebesar 502 triliun itu.

Kasihan itu Pertamina dan PLN yang selama ini menanggung arus kas yang berat karena keterlambatan pemerintah membayar dana kompensasi,"

Sementara itu dalam RAPBN 2023, ICP dipatok 90 USD per barel, lifting minyak 660.000 per barel, dan gas bumi 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Menurut Rofik, asumsi ICP sebesar USD 90 per barel ini

cukup moderat mengingat saat ini harga minyak mentah dunia di kisaran angka itu. Ini sudah sampai di level harga sebelum perang Rusia dan Ukraina.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Masyarakat Kesulitan Dapatkan Peralite, Aleg PKS: Pemerintah dan Pertamina **Harus Sigap!**

## KUTIPAN

Jakarta (14/08) --- Permasalahan terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia seakan tak ada hentinya sepanjang tahun 2022. Setelah dihadapkan pada kenaikan harga BBM, masyarakat kembali menanggung kenyataan pahit sebab Peralite sulit didapatkan setidaknya selama satu pekan terakhir.

Kenyataan di lapangan yang dilaporkan justru berbanding terbalik dengan pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, yaitu Irto Ginting yang mengatakan bahwa stok Peralite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.

Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PKS, yaitu Nurhasan Zaidi menanggapi terjadinya kelangkaan Peralite. Nurhasan meminta penjelasan secara terbuka dan transparan kepada Pertamina atas ketidaksesuaian antara persediaan stok dengan fakta yang terjadi di lapangan.

"Dari sisi volume penyediaan Peralite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Peralite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia," ungkap Nurhasan.

"Dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Peralite, kelihatannya sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat akan Peralite ini," sambungnya dengan tegas.

Nurhasan menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Peralite. Menurutnya, ketersediaan Peralite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi.

"Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Peralite," tegas Legislator PKS Dapil Jawa Barat IX ini.

"Peralite ini termasuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) jadi menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat contingency plan menghadapi berbagai skenario ke depan," pungkasnya mengakhiri.



**H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I**

Anggota Komisi VII DPR RI

"Dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Peralite, kelihatannya sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Peralite ini,"

# Aleg PKS Dukung Kemensos Usulkan Pendamping Sosial Alih Status Menjadi PPPK

## KUTIPAN

Jakarta (10/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mendukung upaya Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan pendamping sosial beralih status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada Kementerian PAN-RB.

Hal ini disampaikan Bukhori saat menjadi narasumber dalam acara peningkatan kapasitas pilar sosial di Kota Salatiga, Jawa Tengah, Senin (08/08/2022).

"Ikhtiar baik Kemensos untuk meningkatkan kualitas para pendamping sosial yang selama ini belum memiliki kejelasan status untuk menjadi pegawai pemerintah patut didukung secara konkrit. Para pendamping sosial yang telah bekerja secara profesional dan berdedikasi tinggi layak mendapatkan penghargaan ini mengingat peran vital mereka sebagai ujung tombak kebijakan Kemensos di tengah masyarakat," kata Bukhori.

Anggota DPR Fraksi PKS ini

mengatakan, Komisi VIII DPR selaku mitra Kemensos berkomitmen untuk membantu memastikan segala hal yang dibutuhkan oleh Kemensos untuk menyelesaikan alih status pendamping sosial menjadi PPPK dapat terlaksana secara memadai.

"Terdapat ratusan pendamping sosial yang berada di dapil kami yang meliputi Semarang, Kendal, dan Salatiga. Para pendamping sosial yang terdiri dari pendamping PKH, penyuluh sosial, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) telah kami buatkan kanal komunikasi khusus bagi masing-masing dapil demi memudahkan

koordinasi dan penyampaian dinamika informasi terkini dari pusat terkait dengan persiapan alih status menjadi PPPK. Kami juga akan menyediakan advokasi bagi pendamping sosial yang mengalami kesulitan dalam rangka persiapan alih status tersebut," jelas Bukhori.

Legislator Dapil Jawa

Tengah 1 ini mengimbau para pendamping sosial untuk segera memperbarui data pribadi mereka yang tercatat di pusat data Kemensos untuk kepentingan pendataan. Selain itu, dia juga mendorong para pendamping sosial untuk menyiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebaik-baiknya mengingat akan ada tes yang harus mereka lalui sebelum alih status menjadi PPPK.

Sebelumnya, Plt. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Robben Rico, mengumumkan bahwa Kemensos akan mengusulkan para tenaga kerjanya yang belum berstatus ASN agar diusulkan menjadi pegawai dengan status PPPK.

Hal ini merespons kebijakan Kementerian PAN-RB yang akan menghapus tenaga kerja di instansi pemerintah



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Ikhtiar baik Kemensos untuk meningkatkan kualitas para pendamping sosial yang selama ini belum memiliki kejelasan status untuk menjadi pegawai pemerintah patut didukung secara konkrit. Para pendamping sosial yang telah bekerja secara profesional dan berdedikasi tinggi layak mendapatkan penghargaan ini mengingat peran vital mereka sebagai ujung tombak kebijakan Kemensos di tengah masyarakat

yang tidak berstatus ASN.

"Atas dasar itu, saya mengimbau kepada pendamping sosial Kemensos yang tersebar di sejumlah

daerah di Indonesia untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk kepentingan alih status tersebut," ungkap Bukhori.

WNI Banyak Berobat ke LN

# Aleg PKS Sarankan Perbaikan Mendasar Kualitas Kesehatan

**KUTIPAN**

Jakarta (11/08) --- Presiden Joko Widodo menyayangkan masih banyaknya WNI yang berobat ke luar negeri. Presiden bahkan menyebut ada Rp 110 Triliun capital outflow yang keluar untuk pengobatan WNI di luar negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menyebut keprihatinan Presiden Joko Widodo harus diwujudkan dalam percepatan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia baik dari sisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) maupun Tenaga Kesehatan berstandar internasional.

"Spirit kemandirian nasional selalu kita dukung. Jika ada keprihatinan banyaknya WNI berobat ke luar negeri maka harus ada percepatan realisasi kebijakan perbaikan pelayanan kesehatan dengan standar internasional," sebut Kurniasih dalam keterangannya, Kamis (11/08).

Menurut Kurniasih,

setidaknya ada beberapa hal mendasar yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas kesehatan berstandar internasional.

Pertama memenuhi rasio jumlah tenaga kesehatan per satuan penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar memang menjadi satu tantangan untuk menambah rasio tenaga kesehatan di Indonesia yang masih kurang.

Menyitir data World Bank 2010-2017, rasio dokter di Indonesia hanya 0,4 dokter per 1.000 penduduk dan terendah kedua di Asia Tenggara. Dibandingkan dengan Singapura dengan rasio 2 dokter per 1.000 penduduknya.

"Harus ada kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk menambah rasio tenaga kesehatan kita per satuan penduduk jika ingin mengejar ketertinggalan kualitas kesehatan kita di dunia," ungkap Kurniasih.

Kedua, peningkatan kualitas RS di Indonesia dengan pemenuhan standar nasional dan standar internasional. Kurniasih menyebut perlu didorong dan pendampingan bagi RS di Indonesia untuk minimal memenuhi standar pelayanan nasional dan target standar internasional.

Termasuk mengembangkan RS khusus untuk penyakit-penyakit yang banyak pasien Indonesia memilih berobat di RS Luar Negeri seperti kanker.

"Kita baru memiliki setidaknya 36 rumah sakit yang terakreditasi internasional oleh Joint Commission International (JCI) maupun Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Selengkapnya kunjungqg fraksi.pks.id



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Harus ada kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk menambah rasio tenaga kesehatan kita per satuan penduduk jika ingin mengejar ketertinggalan kualitas kesehatan kita di dunia,"

# Live Interactive

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



## Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





# Pemerintah Hapuskan Tenaga Honorer 2023, Wakil Ketua FPKS Ingatkan Potensi Ledakan Pengangguran

● KUTIPAN

Jakarta (12/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengingatkan pemerintah akan potensi ledakan pengangguran apabila tenaga honorer dihapuskan dari instansi pemerintah berdasarkan Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022.

"Penghapusan tenaga honorer setelah November 2023 akan menjadi beban negara karena serapan tenaga kerja menurun sehingga berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat.

Padahal kita masih dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19," kata Netty dalam keterangan medianya, Jumat (12/08).

Berdasarkan data Kemenpan RB, per Juni 2021, sebelum pelaksanaan CASN 2021, jumlah tenaga honorer (THK-II) Indonesia mencapai 410.010 orang.

"Banyaknya honorer yang berpotensi menjadi pengangguran ini bukan saja memengaruhi ekonomi, tapi juga akan memicu permasalahan sosial

lainnya. Akibat daya beli turun, maka tidak menutup kemungkinan kriminalitas akan meningkat. Akibat daya beli turun, pangan bergizi akan sulit dipenuhi masyarakat. Dampaknya tentu akan berpengaruh pada upaya penurunan stunting dan masalah kesehatan lainnya," katanya.

Oleh karena itu Netty meminta pemerintah membuat aturan turunan yang realistis, jelas dan berpihak kepada tenaga honorer.

"Sampai sekarang belum ada aturan turunan sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap permasalahan honorer. Artinya setelah November 2023 nanti, para honorer akan dihilangkan begitu saja, meskipun ada yang sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun," kata Netty.

Politik PKS ini berharap pemerintah mau mengakomodasi poin-poin tuntutan honorer yang disampaikan melalui unjuk rasa di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

"Misalnya, tidak membuka tes ASN, CPNS, atau PPPK dari jalur umum dan mendahulukan mengangkat tenaga honorer yang sudah ada. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan adanya penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemda dengan nomenklatur definitif, yaitu pembiayaan PPKK," jelasnya.

Menurut Netty, adanya dana alokasi khusus definitif tersebut penting mengingat

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Banyaknya honorer yang berpotensi menjadi pengangguran ini bukan saja memengaruhi ekonomi, tapi juga akan memicu permasalahan sosial lainnya. Akibat daya beli turun, maka tidak menutup kemungkinan kriminalitas akan meningkat. Akibat daya beli turun, pangan bergizi akan sulit dipenuhi masyarakat."

pemerintah daerah akan kesulitan jika APBD dibebankan biaya alih status tenaga honorer.

"Selain itu, secara realitas

di lapangan, pemda memang masih bergantung pada tenaga honorer dalam melakukan pelayanan pada masyarakat," katanya.



# Bersama Kemenparekraf RI, Sakinah Al-Jufri Gelar Bimtek Pemasaran Produk Pariwisata dan Ekraf

## KUTIPAN

Palu (07/08) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis Pengembangan Wilayah Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Jumat (05/08/2022).

Bimbingan Teknis Pengembangan Wilayah Indonesia kali ini mengusung tema strategi pemasaran produk pariwisata dan ekonomi kreatif bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berasal dari empat kabupaten di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Dapil Sulawesi Tengah, Sakinah Aljufri menyatakan bahwa, Sulawesi Tengah terutama di Kota Palu sangat terkenal dengan bawang

goreng.

“Bahwa produk bawang goreng Sulawesi Tengah punya cita rasa tersendiri yang khas, unik dan renyah yang tidak ada duanya. Produk bawang goreng Palu ini sudah sering mengikuti pameran di berbagai kegiatan,” ucapnya.

Politisi perempuan PKS ini pun sebelum membuka bimtek secara resmi berharap, peserta bimtek tidak menyalakan kesempatan baik ini,

“Dengan kegiatan ini, saya berharap peserta bimtek tidak

menyalakan kesempatan untuk mengambil ilmu yang banyak. Bahkan bukan hanya mengambil ilmu saja tapi harus diamalkan segera,” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Taufik Nurhidayat Koordinator Pemasaran Pariwisata Nusantara Area I Kemenparekraf/Baparekraf RI, H. Hadianto Rasyid, SE Walikota Palu, Dr. Farid Rifai Yotolembah, S. Sos., M. Si. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu dan sebagai narasumber Dr. Hery Margono, Sekretaris Jendral Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I).



## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

“Sulawesi Tengah terutama di Kota Palu sangat terkenal dengan bawang goreng. Bahwa produk bawang goreng Sulawesi Tengah punya cita rasa tersendiri yang khas, unik dan renyah yang tidak ada duanya. Produk bawang goreng Palu ini sudah sering mengikuti pameran di berbagai kegiatan”



# Aleg PKS: Stop Pemborosan Anggaran! Pemerintah Perlu Fokus Bantu Masyarakat

## KUTIPAN

Jakarta (12/08) --- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, mengingatkan bahwa perekonomian sedang menghadapi ancaman, karenanya pemerintah perlu cermat dan menghentikan pemborosan yang tidak perlu.

"Perekonomian dunia menghadapi gejala yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang, namun juga dampaknya melalui krisis energi sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia" ujar Ecky.

Dampak yang dirasakan terhadap sektor riil dan masyarakat, kata Ecky, cukup besar. Transmisinya melalui dua hal, yakni kenaikan harga minyak dan pangan.

"Mestinya, dua hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi

mengerus pendapatan riil masyarakat," ungkapnya.

Pada Juli 2022, kata Ecky, upah buruh nominal hanya naik 0,3 persen secara tahunan. Namun, inflasi secara tahunan mencapai 4,94 persen.

"Artinya kenaikan kesejahteraan buruh tidak setimpal dengan kenaikan harga yang dihadapi. Kesejahteraan buruh tergerus cukup dalam" jelas Ecky

"Rakyat bawah merasakan langsung dampak dari gejala ini. Bantuan rakyat perlu diperkuat!" imbuh Ecky tegas.

Ecky mendesak agar Pemerintah fokus untuk menyelesaikan persoalan riil di masyarakat. Ia menilai bahwa ruang fiskal yang sempit ini sangat tidak mungkin jika digunakan untuk memenuhi

seluruh keinginan dan ambisi pemerintah.

"Pemerintah harus memilah, mana kebutuhan prioritas dan mana yang keinginan. Anggaran kita sangat terbatas jika harus memaksakan pengeluaran ambisius yang tidak penting dan tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan. Jangan boros dan ambisius!" tambah Ecky.

"Untuk itu, saya meminta pemerintah untuk melakukan dua hal: Pertama, pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat," ujarnya.

Pengeluaran tidak penting dan serampangan tersebut, tegasnya, salah satunya adalah kereta cepat. Sejak awal kereta cepat ini sudah sangat bermasalah.

"Anggaran pembangunan dan pembengkakan yang terjadi tidak patut untuk dibebankan pada APBN. Proyek ini bukan proyek rakyat, dan tidak berdampak terhadap rakyat. Oleh karena itu tidak pantas jika uang rakyat digunakan untuk membiayai proyek serampangan tersebut. Contoh lainnya



**H. ECKY AWAL MUCHARAM**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Anggaran pembangunan dan pembengkakan yang terjadi tidak patut untuk dibebankan pada APBN. Proyek ini bukan proyek rakyat, dan tidak berdampak terhadap rakyat. Oleh karena itu tidak pantas jika uang rakyat digunakan untuk membiayai proyek serampangan tersebut

adalah ambisi pemindahan ibu kota negara. Pemindahan ini bukan prioritas dan tidak tepat jika kemampuan fiskal yang terbatas harus digunakan untuk

proyek pemborosan ini," urai Ecky.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id





**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**

# Sosialisasikan Germas di Dapil, Netty: **SDM Unggul** Diawali dari Kebiasaan Hidup Sehat

## KUTIPAN

Kegiatan Sosialisasi Germas merupakan program kemitraan Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.

Bandung (09/08) — Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani mengatakan praktik pola hidup sehat harus dimulai dari diri sendiri, tanpa sulit dan mahal. Netty menuturkan, dengan hidup sehat dan bugar maka akan lahir SDM unggul, produktif dan mampu bersaing di era global.

"Saya optimis bahwa SDM kita bisa lebih unggul dari tenaga kerja asing yang berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Awali dengan gaya hidup sehat dan terpenuhinya aspek penunjang lainnya, seperti gizi, pendidikan, kesempatan dan sebagainya," kata Netty dalam pemaparan materi Sosialisasi Germas untuk Penurunan Stunting dan Covid-

19, pada Senin (8/8/2022) di Rest Area Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Menurut Netty, kesadaran jalani hidup sehat masih rendah, salah satunya karena masyarakat belum tahu cara mudah dan praktis menerapkannya. Netty pun membagikan sejumlah kiatnya.

"Nggak perlu mahal dan nggak sulit. Saya mengurangi porsi karbohidrat, makan teratur, serta perhatikan jarak waktu makan, jenis dan jumlah makanan. Kami pun menyediakan sebagian bahan pangan sendiri. Misal, memelihara ayam petelur, ada kolam ikan dan menanam sayuran di halaman," kata politisi asal Jawa Barat ini.

Terkait stunting, Netty menjelaskan bahwa stunting akibat gizi ibu yang tidak optimal sehingga memengaruhi pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan bayi.

"Dampak stunting ini meluas dan merambat ke berbagai aspek, bukan hanya permasalahan tubuh kecil dan kerdil, tapi juga berpengaruh pada penurunan fungsi otak yang bisa menghambat sensor motorik saat masa tumbuh kembangnya," ungkap Netty.

Netty menegaskan praktik hidup sehat harus menjadi prioritas masyarakat Indonesia sedini mungkin untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul.

Kegiatan Sosialisasi Germas merupakan program kemitraan Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mengedukasi masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat.



**Dr. Hj. NETTY PRASETYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI

"Kesadaran jalani hidup sehat masih rendah, salah satunya karena masyarakat belum tahu cara mudah dan praktis menerapkannya. Nggak perlu mahal dan nggak sulit. Saya mengurangi porsi karbohidrat, makan teratur, serta perhatikan jarak waktu makan, jenis dan jumlah makanan. Kami pun menyediakan sebagian bahan pangan sendiri. Misal, memelihara ayam petelur, ada kolam ikan dan menanam sayuran di halaman"

# Masa Reses, Diah Nurwitasari Menyapa Majelis Taklim di Daerah Pemilihan

## KUTIPAN

Padalarang (08/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari bersilaturahmi dengan konstituen di beberapa majlis taklim di Kecamatan Ngamprah dan Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Pada kunjungannya kali ini adeg PKS yang akrab disapa Teh Diah ini didampingi oleh Nur Djulaeha, anggota Fraksi PKS DPRD KBB dan beberapa relawan PKS setempat.

Dalam kesempatan tersebut Diah menyampaikan peran anggota DPR-RI bagi kehidupan masyarakat luas.

"Kami memang tidak bisa memberikan program pembangunan secara langsung kepada masyarakat, tapi kami membantu menyusun anggaran dan mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah," ungkap Diah.

"Anggota Dewan PKS tidak

memberikan uang secara langsung kepada masyarakat, tapi kami membantu masyarakat menghemat uang dengan cara menjaga agar pemerintah tidak mencabut atau mengurangi subsidi pada kebutuhan pokok masyarakat seperti TDL dan gas LPG 3 kg." Diah melanjutkan penjelasannya.

Di akhir acara Diah mengajak semua hadirin untuk selalu bersyukur dan mendo'akan kebaikan, keselamatan serta keberkahan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dipl.Ing. Hj. **DAIH NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Kami memang tidak bisa memberikan program pembangunan secara langsung kepada masyarakat, tapi kami membantu menyusun anggaran dan mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah"



# Tumbuhkan Kebersamaan, Rofik Hananto Adakan Lomba Agustusan Bersama Warga

## KUTIPAN

Melalui kegiatan memeriahkan HUT Ke 77 Kemerdekaan RI ini, diharapkan masyarakat merasakan bahwa kemerdekaan ini hasil perjuangan para pahlawan. Sehingga tumbuh jiwa nasionalisme, menumbuhkan semangat membangun bersama negara tercinta ini.

Purbalingga (08/08) — Anggota DPR RI FPKS Rofik Hananto mengadakan lomba-lomba menyemarakkan HUT Ke 77 Kemerdekaan RI, Minggu (07/08/2022).

Lomba yang diadakan di halaman parkir rumahnya itu bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan masyarakat.

"Kegiatan ini menjadi sarana untuk membangun dan menggalang kebersamaan, mengisi kemerdekaan RI. Semoga dengan kegiatan ini dapat terbangun kekeluargaan, kebersamaan, hidup rukun," kara Rofik disela-sela kegiatan.

Menurut legislator asal Dapil Jawa Tengah VII itu, untuk

membangun negeri yang besar ini membutuhkan kegyuyubrukunan, kegotongroyongan. Dan kegiatan itu adalah bentuk implementasi dari kegotongroyongan dan kekompakan.

"Macam-macam lomba ini untuk membangun kebersamaan, bukan untuk mencari hadiah. Saya berharap, sebagai anak bangsa yang mengisi kemerdekaan agar terus semangat untuk Indonesia yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera," katanya.

Melalui kegiatan memeriahkan HUT Ke 77

Kemerdekaan RI ini, diharapkan masyarakat merasakan bahwa kemerdekaan ini hasil perjuangan para pahlawan. Sehingga tumbuh jiwa nasionalisme, menumbuhkan semangat membangun bersama negara tercinta ini.

Sementara itu ada 10 lomba yang diadakan. Yaitu Panjat Pinang, SEMAR Fashion Show, Estafet Sarung, Makan Kerupuk, Kelereng Sendok, Balap Karung, Estafet Terigu, Nyunggi Tampah, Pensil Botol, dan Tampok Air.

Kegiatan Semar Akan HUT Ke 77 Kemerdekaan RI ini diikuti masyarakat dari berbagai wilayah Kabupaten Purbalingga, yang mempersebutkan hadiah jutaan rupiah dan puluhan door prize mulai dari TV dan perlengkapan rumah tangga. Kegiatan juga memeriahkan dengan senam Go PKS Go.



## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Macam-macam lomba ini untuk membangun kebersamaan, bukan untuk mencari hadiah. Saya berharap, sebagai anak bangsa yang mengisi kemerdekaan agar terus semangat untuk Indonesia yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera,"





# Saat Bertemu Konstituen, Kurniasih: Jika Ada Anak Stunting di Jakarta, Lapor Saya!

## KUTIPAN

Jakarta (08/08) --- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) di dua titik di wilayah Jakarta Pusat, Sabtu (6/8/2022).

Kurniasih menegaskan pihaknya sangat mendukung program pengentasan masalah stunting termasuk di Jakarta. Pencegahan stunting sangat penting agar generasi mendatang memiliki modal kesehatan fisik dan mental yang bagus.

Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini mengungkapkan kepada ratusan peserta sosialisasi Bangga Kencana ini jika ada persoalan stunting di sekitarnya bisa langsung lapor ke dirinya.

"Bapak ibu tokoh

masyarakat di Jakarta Pusat ini, jika ada anak stunting di sekitarnya tolong langsung lapor ke saya. Saya akan mengunjungi langsung seperti yang sudah beberapa kali kita lakukan. Sebab anak yang masih stunting butuh perhatian ekstra terutama tumbuh kembangnya," ucap Kurniasih.

Kurniasih menambahkan sehatnya generasi dengan mencegah stunting ini penting. Sebab Pemerintah sendiri telah menetapkan program Indonesia Emas 2045. Tercapainya Indonesia Emas 2045 hanya

berada terjadi dengan tumbuh kembangnya anak Indonesia yang sehat bukan hanya fisik tapi juga mental dan spiritual.

"Sebab itu anak

Indonesia harus bebas stunting termasuk di DKI Jakarta ini. Kita harus peduli dengan lingkungan dengan tetangga kita, lihat apakah masih ada anak-anak yang kekurangan gizi," sebut Kurniasih.

Kurniasih pun turut mengapresiasi BKKBN sebagai badan yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk mengemandani program pencegahan stunting.

"Apalagi BKKBN ini badan yang mengurus kita seluruh bangsa Indonesia dengan program sejak sebelum kelahiran sampai kakek nenek. Ini tugas yang besar untuk menjaga kualitas keluarga Indonesia. Ingat ya bapak ibu, BKKBN tugasnya bukan hanya KB saja tapi memperhatikan kita semua bahkan sebelum kelahiran anak," kata Kurniasih.

la pun mengingatkan program 1000 hari pertama kehidupan. Yakni penjagaan nutrisi ibu hamil dan janin selama



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

“Sehatnya generasi dengan mencegah stunting ini penting. Sebab Pemerintah sendiri telah menetapkan program Indonesia Emas 2045. Tercapainya Indonesia Emas 2045 hanya bisa terjadi dengan tumbuh kembangnya anak Indonesia yang sehat bukan hanya fisik tapi juga mental dan spiritual

kehamilan dan dua tahun setelahnya dengan pemberian ASI dan nutrisi yang baik.

"Ini solusi untuk mengatasi stunting tadi yakni memperhatikan asupan gizi 1.000 hari pertama kehidupan. 9 bulan selama kehamilan dan

dua tahun pertama diberikan ASI dan makanan pendamping ASI. Sebab 1.000 pertama kehidupan adalah periode emas yang menentukan tumbuh kembang anak kita ke depan," ungkap Kurniasih.

# Reses di Dapil, Iskan Beri Bantuan Modal Usaha, Khitanan Massal dan Serahkan Ambulance

## KUTIPAN

Mandailing Natal (08/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis dalam Masa Reses Tahun Persidangan V memberikan beberapa jenis Bantuan khusus nya untuk di daerah Padang Lawas dan Mandailing Natal.

Penyerahan simbolis bantuan keserasian sosial Kemensos ini diserahkan kepada kelompok serasi makmur di Desa Siolip, Padang Lawas, Sabtu (06/08/2022).

"Alhamdulillah acara yang di selenggarakan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dan masyarakat disini akan mendapatkan bantuan total sebesar 150 juta, 30 juta diantaranya berbentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yaitu ternak kambing. Bantuan ini akan digunakan untuk normalisasi arus sungai dengan membangun bronjong-bronjong, agar ketika air meluap, desa Siolip dan desa lainnya seperti Binabo Jae, Binabo Julu, Simannggir, Sabarimba, dan

Limbong tidak terdampak banjir lagi akibat luapan sungai dikemudian hari", ujar Iskan.

Anggota Legislative asal Sibuhuan ini juga memberikan program khitanan massal yang diselenggarakan di 3 Kabupaten.

"Program Khitanan Massal ini saya melihat sangat baik dan berjalan secara lancar serta hikmat. Khitanan massal ini yang diselenggarakan di 3 Kabupaten yaitu di klinik Erni Barumun Padang Lawas, klinik Panca Medika Padang Sidempuan dan klinik Prima Sehat Mandailing Natal. Alhamdulillah program ini dapat terselenggara dengan lancar serta berkat dukungan juga dari pihak BPKH dan Baznas

Republik Indonesia. Saya berharap kegiatan ini menjadi suatu kegiatan yang sangat di syukuri oleh masyarakat di Padang Lawas khususnya dengan terselenggaranya kegiatan ini kita dapat membantu serta meringankan beban saudara-saudara kita masyarakat yang kurang mampu tersebut", tegas Iskan. Lebih lanjut, Iskan juga menyerahkan 2 Unit Ambulance khususnya untuk kepentingan Medis di daerah Padang Lawas dan Mandailing Natal.

"Kegiatan penyerahan 2 Unit Mobil Ambulance ini saya sangat apresiasi sekali karena ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terlebih untuk membantu bantuan secara medis bagi masyarakat kita disini. Mobil Ambulance yang didukung dari BPKH dan Baznas ini sangat luar biasa, baik dari segi perlengkapan didalamnya. Mulai dari perlengkapan alat kesehatan yang mendukung untuk kepentingan medis urgensi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. Ini sangat bagus, Alhamdulillah kita telah



## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Alhamdulillah acara yang di selenggarakan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dan masyarakat disini akan mendapatkan bantuan total sebesar 150 juta, 30 juta diantaranya berbentuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yaitu ternak kambing. "

menyerahkan 2 unit mobil Ambulance ini secara lancar tanpa ada kendala sama sekali, semoga program bantuan ini dapat bisa membantu melancar

kan tindakan medis juga untuk masyarakat kita di Padang Lawas dan Mandailing Natal, Sumatera Utara," pungkas Iskan mengakhiri.

# Palang Pintu saat Sosialisasi 4 Pilar di Dapil, Syaikh: Ini Wujud Kebhinekaan

**KUTIPAN**

Kabupaten Bekasi (10/08) --- Ada yang unik saat Anggota MPR RI Ahmad Syaikh melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Ahad (07/08/2022). Ketika hendak masuk ke ruang acara sempat tertahan sekitar 30 menit lamanya.

Sebabnya ada Palang Pintu dari Perguruan Pencak Silat Pusaka Muda Kabupaten Bekasi. Ini seni budaya khas Suku Betawi. Sering ditampilkan ketika ada acara pernikahan, dan lainnya.

Menurut Syaikh, pertunjukan seni budaya semacam ini sangat tepat dengan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Karena memperkenalkan keragaman suku dan ada istiadat yang kita miliki.

"Ini sekaligus cerminan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam 4 Pilar MPR RI," ujar Syaikh.

Ada sajian berbalas pantun dan pertunjukan antara

pendekar. Satu pihak menghalangi untuk masuk dan pihak lain membantu saya agar dapat mengatasi rintangan tersebut. Makanya disebut palang pintu. Lokasi atraksinya tepat di depan pintu masuk acara.

Syaikh menjelaskan, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dari Sabang hingga Merauke. Mulai dari bahasa, suku, agama hingga budaya.

"Kebhinekaan ini sebuah anugerah dari Allah SWT. Tak banyak bangsa lain yang mempunyai keragaman seperti

kita," kata Syaikh.

Anugerah ini akan menjadi modal besar memajukan Ibu Pertiwi jika kita mampu mengelolanya. Sebaliknya, bisa menjadi bencana jika kita tak pandai meramunya.

"Pada titik inilah pentingnya Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Yakni sebagai cara untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kebhinekaan yang kita miliki dan bagaimana merawatnya," papar Syaikh.

Syaikh sangat menantikan acara seperti ini. Alasannya?

"Bisa menjadi salah satu kontribusi untuk mewujudkan cita-cita Para Pendiri Bangsa saat memerdekakan Indonesia. Insya Allah..." pungkas Syaikh.



**H. AHMAD SYAIKHU**

Anggota Komisi I DPR RI

"Pertunjukan seni budaya semacam ini sangat tepat dengan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Karena memperkenalkan keragaman suku dan ada istiadat yang kita miliki. Ini sekaligus cerminan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam 4 Pilar MPR RI,"



# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atroaktif Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



# Banjir Landa 6 Kecamatan, Aleg PKS Minta Bendungan Leuwikeris Selesai Sesuai Target

## KUTIPAN

Menurut Toriq, Pemerintah harus menggenjot pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya-Ciamis. Dampak keberadaan bendungan akan meningkatkan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.

Tasikmalaya (15/08) — Legislator PKS Toriq Hidayat sangat prihatin atas banjir karena air sungai Cimedang meluap. Belasan rumah milik warga terendam, longsor diberapa titik yang berbeda. Selain itu belasan hektar sawah kolam waga ikut terendam.

“Kasihan masyarakat yang tinggal dekat daerah aliran sungai. Akibat intensitas hujan yang tinggi, luapannya merendam 6 kecamatan, rata-rata setinggi 30 centimeter. Namun, Alhamdulillah pemerintah daerah sigap melakukan evakuasi dan

pertolongan,” ujar Anggota Komisi V DPR RI ini.

Potensi musibah banjir di banyak titik dipalinya akan selalu berulang. Oleh karenanya Toriq mewakili masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai sangat berharap bendungan Leuwikeris segera selesai.

“Pak presiden menargetkan 38 bendungan rampung dibangun di Indonesia pada tahun 2022 ini. Saya berharap bendungan Leuwikeris masuk ke dalamnya. Walau pun saat berkunjung pada oktober tahun lalu, pengurusnya menyebutkan bendungan ini

akan beroperasi di 2023,” tuturnya.

Menurut Toriq, Pemerintah harus menggenjot pembangunan Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya-Ciamis. Dampak keberadaan bendungan akan meningkatkan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku dan pengendalian banjir.

“Konstruksi Bendungan Leuwikeris yang dikerjakan sejak 2016. Disebut akan menyediakan air baku bagi bagi Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Mereduksi banjir sebesar 11,7%. Sekaligus menaikkan potensi ekonomi dalam bentuk destinasi pariwisata serta kawasan konservasi air tanah, dan perikanan,” tutupnya.



## KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi V DPR RI

“Konstruksi Bendungan Leuwikeris yang dikerjakan sejak 2016. Disebut akan menyediakan air baku bagi bagi Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Mereduksi banjir sebesar 11,7%. Sekaligus menaikkan potensi ekonomi dalam bentuk destinasi pariwisata serta kawasan konservasi air tanah, dan perikanan

Ancaman Krisis Pangan  
Global Melanda Indonesia

# Aleg PKS : Jangan Lupa Penerapan Keamanannya

**KUTIPAN**

Kubu Raya (13/08) — Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKS, Alifudin mengingatkan kepada pemerintah dan masyarakat tentang solusi dari krisis pangan global dan penerapan keamanan pangan.

"Indonesia sekarang ini sedang dilanda krisis pangan, salah satunya melonjaknya harga-harga pangan, apalagi sekarang gandum, maka kita harus genjot produksi pangan lokal" Tutur Alifudin saat menjadi Keynote Speaker di acara KIE BBPOM di Pontianak Secara Hybrid, 13/8).

Alifudin juga menambahkan bahwa selain mendukung produksi pangan lokal, dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia pada masa Krisis Pangan Global ini, juga harus menerapkan keamanan pangan dalam menkonsumsinya.

"Jadi kalau pun krisis pangan melanda, kita sebagai masyarakat juga jangan lupa tetap menerapkan keamanan pangan dalam menkonsumsi

makanan" Tegas Alifudin

Karena harus menerapkan keamanan pangan dalam mengkonsumsi makanan, karena kalau tidak menerapkan akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau stunting.

"Menjaga kewaspadaan makanan adalah salah satu cara cegah stunting" Ucap Alifudin.

Alifudin pun menambahkan, bahwa selain bersama-sama dukung produksi pangan lokal, atau bisa dikatakan dukung konsumsi produk lokal.

"Tapi juga jangan lupa untuk menjaga keamanan makannya untuk kesehatan kita," tutup Alifudin.



**H. ALIFUDIN, S.E.,M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Indonesia sekarang ini sedang dilanda krisis pangan, salah satunya melonjaknya harga-harga pangan, apalagi sekarang gandum, maka kita harus genjot produksi pangan lokal!"

# Hadir Rakernas ALPPIND, Nevi Sampaikan Peran sebagai Perekat Persaudaraan dan Berkontribusi bagi Bangsa

## KUTIPAN

Jakarta (15/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina yang juga ketua ALPPIND (Aliansi Perempuan Peduli Indonesia) Wilayah Sumatera Barat

pada rakernas yang di selenggarakan di Jakarta, menyampaikan, kehadiran organisasi ini sesuai dengan visinya yakni sebagai perekat persaudaraan dan berkontribusi dalam membangun indonesia yang bermartabat berbasis nilai agama dan budaya.

Nevi mengatakan, salah satu upaya perjuangan ALPPIND yang menjadi komitmen untuk di realisasi di setiap wilayah di Indonesia adalah melawan tindakan kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak

Indonesia.

"ALPPIND ini sudah wadah bagi tokoh aktivis perempuan untuk berkolaborasi dan bersinergi. Bukan sekedar sesama anggota, namun ke berbagai lembaga termasuk pemerintah dengan tujuan membangun bangsa. Berawal sejak tahun 2017 hingga 2018 dimana tokoh perempuan dan aktivis berkumpul, menjadikan organisasi ini terbentuk dengan latar belakang lintas profesi", tutur Nevi Flashback sejarah terbentuknya ALPPIND.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengutarakan, bahwa diskusi-diskusi di wadah kaum perempuan ini untuk membangun proyek kebaikan demi umat, bangsa dan negara. Khusus pada rakernas yang di adakan di Jakarta, fokus ALPPIND akan berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah untuk menekan tindakan kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak. Salah satu yang sudah dilakukan adalah, organisasi ini telah membuat Rumah Cinta Alppind. Ini sebagai pusat konsultasi, baik dari aspek hukum, agama, psikologi dan kesehatan.

"Alhamdulillah, kaum perempuan memiliki satu lagi wadah yang sangat efektif untuk membangun visi misi perjuangan. Ini adalah pertemuan besar pertama sejak empat tahun terakhir secara tatap muka yang dihadiri perwakilan 23 Provinsi, semoga menjadi peningkat kesolidan dan wahana silaturahmi yang sangat efektif", ungkap Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, Rakernas kali ini cukup istimewa dikarenakan hadirnya Gubernur Jakarta untuk memberi sambutan dan juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sebagai narasumber. Kehadiran orang yang berpengalaman memimpin suatu wilayah provinsi dalam membangun dan meningkatkan kapasitas



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"Alhamdulillah, kaum perempuan memiliki satu lagi wadah yang sangat efektif untuk membangun visi misi perjuangan. Ini adalah pertemuan besar pertama sejak empat tahun terakhir secara tatap muka yang dihadiri perwakilan 23 Provinsi, semoga menjadi peningkat kesolidan dan wahana silaturahmi yang sangat efektif"

perempuan dan anak menjadi inspirasi para aktivis perempuan berbagai profesi.

"Kami di Sumatera Barat, ALPPIND wilayah hingga daerah sangat aktif dan terus berkreasikan. Dengan Rakernas ini, Kami akan meneruskan perjuangan untuk membangun

negeri ini di daerah-daerah. Tentunya dukungan pemerintah daerah dan semua elemen lembaga di daerah akan menjadi mitra yang sangat penting terealisasinya perjuangan aliansi ini", tutup Nevi Zuairina yang juga ketua ALPPIND Sumbar ini.



# Nevi Zuairina Adakan Workshop Pemasyarakatan E-Commerce bagi pelaku UMKM Padang Pariaman

## KUTIPAN

Pariaman (13/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina mengadakan workshop Pemasyarakatan e-Commerce bagi pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Adalapun pelaku UMKM yang hadir, tersebar dari 17 kecamatan yang berbeda-beda.

Kendati peserta dari Kabupaten Pariaman, Nevi mengatakan untuk lokasi workshop dilaksanakan di Kota Pariaman, tepatnya di aula serba guna sambal lado Kota Pariaman.

"Alhamdulillah workshop untuk UMKM di Sumatera Barat ini terus bergeliat untuk mengimbangi dampak covid 19 yang telah merubah tatanan kehidupan sosial kita. Dengan menurunnya kinerja Ekonomi sebagian besar masyarakat dunia termasuk Indonesia yang juga sampai di Sumbang ini, berbagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merasakan kecemasan bisnis. Untuk itu, peningkatan kualitas SDM

dengan berbagai sarana mesti dilakukan termasuk dengan workshop", tutur Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mendorong para peserta, jangan terbuai dengan situasi usaha yang jatuh karena lesunya roda perekonomian selama berbulan-bulan. Para pelaku UMKM oleh Nevi diminta terus bergerak karena eksistensi UMKM sangat vital dan harus terus dipertahankan untuk menopang tulang punggung perekonomian Nasional.

Nevi mengatakan, perjuangannya di DPR RI Komisi VI, akan bersinergi memperkuat UMKM Sumatera Barat dari

berbagai lini. Ia meyakini, bahwa UMKM nantinya akan menjadi sektor penting karena menjadi kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Kemudian UMKM dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu UMKM juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

"UMKM yang mencapai 64,2 juta se Indonesia telah berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, meski tidak tampak karena tersebar, namun kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi", ungkap Nevi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"Semoga kegiatan ini memberi manfaat yg signifikan terhadap perkembangan usaha bapak ibu semua, dan semoga wabah ini cepat berlalu dengan sepenuhnya, dan kita dapat bertahan serta terus menunjukkan progresifitas ikhtiar untuk menjadi UMKM yang Go Internasional di tahun-tahun yang akan datang"







FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



# *Salurkan* **ASPIRASI ANDA** **DI HARI ASPIRASI** **FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

**Ajuan Aspirasi**

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

HUT Kemerdekaan Indonesia Ke 77

# Bukhori: Bangsa Kita Harus Waspada Ancaman Demoralisasi

**KUTIPAN**

Dalam merespon pidato yang di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Selasa pagi (16/08). Anggota Komisi VIII tersebut juga berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada pendidikan madrasah

Jakarta (16/08) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, KH Bukhori Yusuf Lc., M.A, menyatakan harapannya dalam hari kemerdekaan Indonesia yang Ke-77 tahun.

Hal itu langsung disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Report setelah mengikuti sidang tahunan MPR-RI, DPR -RI DPD-RI dan Sidang Paripurna DPR-RI di Gedung Nusantara, Senayan.

"Tentunya, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sarat akan nilai religi dan moralitas, namun bangsa ini sedang dihadapkan dengan ujian besar dan fenomena yang menginginkan keluar dari jati

dirinya. Maraknya pergaulan bebas, LGBT, kriminalitas yang terjadi di kalangan bawah umur, serta bergesernya moral generasi. Tentu ini sangat memprihatinkan, dan menjadi perhatian kita semua" ucap Bukhori.

Bukhori menyampaikan jika bangsa kita sudah tidak lagi dijajah secara militer namun kita patut menjaga kedaulatan generasi sebab kita lah yang bisa menentukan langkah ke depan dan nasib bangsa ini, tanpa dikuasai dan dipengaruhi oleh budaya impor. Bukhori menekankan jika kita patut untuk mewaspada demoralisasi yang tentunya mengancam kedaulatan

generasi penerus bangsa.

Dalam merespon pidato yang di sampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Selasa pagi (16/08). Anggota Komisi VIII tersebut juga berharap kepada pemerintah untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada pendidikan madrasah

"Saya berharap bahwa pendidikan tidak di maknai untuk sekolah negeri. Tetapi juga untuk sekolah swasta termasuk madrasah. Sebab sebagian besar madrasah tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah. Data kemenag jika 93-97 persen madrasah semuanya swasta. Namun pemerintah belum begitu terasa menyapa dan memperhatikan sekolah swasta termasuk madrasah" urainya.

Terakhir, legislator PKS dapil Jawa Tengah I tersebut mengharapkan dalam alokasi anggaran yang disampaikan oleh Presiden Indonesia dalam pidato kenegaraan, kiranya pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada sekolah swasta khususnya madrasah.

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

"Saya berharap bahwa pendidikan tidak di maknai untuk sekolah negeri. Tetapi juga untuk sekolah swasta termasuk madrasah. Sebab sebagian besar madrasah tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah. Data kemenag jika 93-97 persen madrasah semuanya swasta. Namun pemerintah belum begitu terasa menyapa dan memperhatikan sekolah swasta terkhusus madrasah"

# HUT Kemerdekaan RI Ke 77 Sakinah Aljufri Minta Pemerintah Benahi Sektor Pendidikan, Olahraga, dan Pariwisata

## KUTIPAN

Jakarta (18/08) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, berharap Pemerintah mampu membenahi tiga sektor penting bangsa, yakni pendidikan, keolahragaan, dan pariwisata, di momen perayaan HUT ke-77 RI.

Hal itu disampaikannya dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI- DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Dengan usia Indonesia yang sudah mencapai 77 tahun, seluruh stakeholder harus berbenah. Karena tidak boleh lagi kita berleha-leha", ujarnya.

"Saya dari Komisi X, tentu mengharapkan agar kurikulum

pendidikan kita jangan berubah-ubah. Jangan membuat gaduh, jangan membuat bingung. Siapa pun presiden, siapa pun menterinya, kurikulum kita harus paten. Sehingga anak-anak didik kita, guru-guru kita, bisa menjalankan aktivitas belajar-mengajar dengan baik", ungkap Sakinah lebih lanjut.

Selengkapnya kunjungi  
fraksi.pks.id



## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

"Saya dari Komisi X, tentu mengharapkan agar kurikulum pendidikan kita jangan berubah-ubah. Jangan membuat gaduh, jangan membuat bingung. Siapa pun presiden, siapa pun menterinya, kurikulum kita harus paten. Sehingga anak-anak didik kita, guru-guru kita, bisa menjalankan aktivitas belajar-mengajar dengan baik",

# Dirgahayu Kemerdekaan RI, Tifatul Sembiring: Kita Semua Harus Bekerja dengan Ikhlas bagi Bangsa dan Negara

## KUTIPAN

Jakarta (18/08) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, menyampaikan harapan dan pesannya di momen perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia.

Hal itu diutarakannya dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Merayakan kemerdekaan saat ini adalah dengan ikhlas dalam berbuat untuk bangsa. Dahulu, para pejuang kemerdekaan telah memberikan jasa-jasa mereka, darah, harta dan nyawa mereka dengan penuh keikhlasan. Oleh sebab itu, kita semua harus ikhlas bekerja bagi bangsa dan

negara", ujar Tifatul.

Mantan Menkominfo ini pun mengomentari Pidato Kenegaraan Presiden yang disampaikan di hadapan anggota MPR RI dalam agenda tersebut.

"Kita mengapresiasi capaian-capaian baik dari Pemerintah. Sementara itu, hal-hal yang masih kurang baik, kita berikan masukan. Jadi ini adalah bentuk dari demokrasi. Kita saling membantu satu sama lain. Kita memberikan masukan-masukan terbaik bagi Pemerintah demi kebaikan bangsa ke depan", pungkasnya.



## Ir. H. TIFATUL SEMBIRING

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara I

"Merayakan kemerdekaan saat ini adalah dengan ikhlas dalam berbuat untuk bangsa. Dahulu, para pejuang kemerdekaan telah memberikan jasa-jasa mereka, darah, harta dan nyawa mereka dengan penuh keikhlasan. Oleh sebab itu, kita semua harus ikhlas bekerja bagi bangsa dan negara",

## Peringati HUT ke-77 RI **Nevi: Pemerintah Perlu Pulihkan Ekonomi Rakyat**

### KUTIPAN

Jakarta (17/08) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, berharap Pemerintah dapat memulihkan kondisi ekonomi masyarakat sebagai bentuk langkah konkret dari peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Setelah melalui pandemi selama hampir tiga tahun, kita ingin di Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia ini, memberikan semangat kepada bangsa Indonesia untuk kembali bangkit secara ekonomi, pulih dari segi kesehatan, dan hal-hal baik lainnya", ujar Nevi.

"Semoga Pemerintah mampu mengendalikan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semoga tingkat perekonomian masyarakat semakin meningkat dan merata, bukan hanya di perkotaan, melainkan hingga ke desa-desa", ungkap Anggota DPR dari Dapil Sumatera Barat tersebut.

Terakhir, Anggota DPR Komisi VI ini pun meminta Pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

"Segala hak dan kebutuhan dasar rakyat harus bisa dipenuhi oleh Pemerintah. Walaupun jumlah penduduk kita banyak, itu perlu disikapi sebagai sebuah tantangan yang harus dilalui oleh kita semua", pungkasnya.



### Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"Semoga Pemerintah mampu mengendalikan inflasi, dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semoga tingkat perekonomian masyarakat semakin meningkat dan merata, bukan hanya di perkotaan, melainkan hingga ke desa-desa",

# Rayakan HUT ke-77 RI, **Anis Byarwati: Mengisi Kemerdekaan adalah Tanggung Jawab Bersama**

## KUTIPAN

Jakarta (18/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan harapan dan pesannya dalam momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Para pahlawan telah mengorbankan nyawa, darah, dan air mata untuk bisa tercapainya kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini, perjuangan untuk mengisi kemerdekaan adalah tanggung jawab kita semua", ungkapnya.

Menurut Anis, seluruh rakyat Indonesia wajib berperan dalam mengisi kemerdekaan tersebut.

"Apa pun profesinya, laki-laki maupun perempuan, wajib berkontribusi untuk

menyumbangkan potensi terbaik yang dimiliki untuk mengisi kemerdekaan. Dan kita juga melihat begitu banyak masalah-masalah yang ada di masyarakat, bagaimana kita bisa membantu dan menjadikan Indonesia lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu.

Tak lupa, Wakil Ketua BAKN DPR RI ini pun menyampaikan pesannya kepada Pemerintah. Hal ini dalam rangka menanggapi Pidato Kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi pada agenda Sidang Tahunan tersebut.

"Kita mengapresiasi kerja-kerja Pemerintah yang selama ini sudah dilakukan, dan tentu kita semua berharap

Pemerintah bekerja lebih keras lagi. Mengingat, kita belum sepenuhnya pulih dari pandemi, dan sebagian masyarakat kita tingkat kesejahteraannya masih di bawah standar. Tingkat kemiskinan tinggi, pengangguran masih tinggi, inflasi bahan pangan juga masih terjadi. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pemerintah", ucapnya lagi.

Anis pun mengajak kepada seluruh stakeholder untuk bersama membangun bangsa dan negara.

"Kita wajib berkolaborasi dan bekerja bersama untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, sehingga masyarakat Indonesia betul-betul bisa menikmati kemerdekaan itu dengan segala makna yang tergabung di dalamnya", tutupnya.

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

"Apa pun profesinya, laki-laki maupun perempuan, wajib berkontribusi untuk menyumbangkan potensi terbaik yang dimiliki untuk mengisi kemerdekaan. Dan kita juga melihat begitu banyak masalah-masalah yang ada di masyarakat, bagaimana kita bisa membantu dan menjadikan Indonesia lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu."

# Peringati HUT ke-77 RI Hamid Noor Yasin: Mari Bersama Atasi Persoalan Rakyat dan Bangsa

**KUTIPAN**

Jakarta (17/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hamid Noor Yasin, meminta Pemerintah untuk bekerja keras dan berkolaborasi dengan seluruh elemen guna mengatasi persoalan bangsa.

Hal itu disampaikan dalam acara PKS Legislative Report guna menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini, tetapi juga masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, perlu ditingkatkan, karena angka pengangguran juga masih tinggi, kemiskinan masih banyak. Hal ini yang perlu menjadi concern kita bersama", ungkap Hamid.

Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi dari

semua pihak untuk bisa menyelesaikan segala masalah yang ada.

"Pemerintah wajib berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran, sehingga momen hari kemerdekaan ini bisa kita maknai bahwa bangsa kita semakin sejahtera, semakin jaya, semakin hebat, dan semakin semakin kuat", ujarnya lagi.

Terakhir, Hamid menyinggung potensi krisis ekonomi akibat pengaruh global, yang menurutnya, perlu diantisipasi bersama.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IV

"Pemerintah dan segenap elemen bangsa harus bahu-membahu untuk mengantisipasi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global, kemudian melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan pendapatan negara. Mari, kita isi kemerdekaan dengan bekerja keras dengan penuh kesungguhan

# Johan Sayangkan Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Singgung Wabah PMK pada Hewan Ternak

## KUTIPAN

Jakarta (18/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menyayangkan isi pidato kenegaraan maupun pidato mengenai RAPBN 2023 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi yang sama sekali tak menyinggung tentang persoalan mewabahnya PMK (penyakit mulut dan kuku) pada hewan ternak.

Dimana kasus ini menurut Johan mestinya jadi perhatian pada momentum kebangsaan pidato kenegaraan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap nasib para peternak yang menghadapi derita berat akibat ganasnya wabah PMK saat ini.

Menurutnya, seharusnya pidato Jokowi menggambarkan realitas yang dihadapi rakyat termasuk para peternak di seluruh Indonesia yang hari ini menunggu terobosan pemerintah dalam

mengendalikan wabah PMK yang perkembangannya kasusnya terus meningkat.

“Pidato kenegaraan sebaiknya jangan hanya bersifat retorika, namun diperlukan potret realitas yang dihadapi rakyat secara ril saat ini, sangat disayangkan jika wabah PMK yang begitu meluas dan mencemaskan di seluruh tanah air namun sama sekali tidak disinggung perhatian pemerintah terhadap nasib peternak dan kondisi peternakan saat ini” cetus

Johan.

Politisi PKS ini minta pemerintah berkomitmen penuh dalam pengendalian wabah PMK di Indonesia dan sebetulnya sangat strategis apabila komitmen tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan resmi yang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, tutur Johan setelah mendengarkan secara langsung isi pidato Jokowi di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Selasa, 16/8).

“Saya berharap Presiden Jokowi memberikan harapan kepada seluruh peternak bahwa Indonesia bisa bebas PMK Kembali dan menyampaikan komitmennya mengenai keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan konsep pengendalian dan penanggulangan PMK berbasis status wilayah dan risiko” ucap Johan yang menyalkan lemahnya kinerja pemerintah dalam upaya pengendalian wabah PMK ini.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini mendorong agar tema 77 tahun



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T.**

Anggota Komisi IV DPR RI

“Pemerintah mesti membantu para peternak untuk bangkit lebih kuat dalam menghadapi wabah PMK ini dan memberikan porsi anggaran memadai untuk membangkitkan peternakan nasional menuju cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa ini”

kemerdekaan Indonesia mengenai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dapat diimplementasikan secara nyata untuk pemulihan kondisi peternakan di tanah air yang sedang terpuruk akibat wabah PMK yang sudah menyebar

lebih dari 19 provinsi dan lebih dari 216 kabupaten kota serta menyebabkan banyak kerugian akibat hewan ternak yang sakit, mati dan gejala lainnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atakrif Substantif*



Mengenalkan tokoh pahlawan bangsa dan perjuangannya kepada generasi bangsa agar dapat meneladani mereka dan tidak ada mata rantai sejarah yang putus.

# Presiden PKS: Peringatan HUT Kemerdekaan RI Momentum Penting Evaluasi Perjalanan Bangsa

## KUTIPAN

Jakarta (17/08) — Peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia menjadi momentum dalam mengevaluasi perjalanan bangsa dan menyusun perbaikan demi mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.

Hal itu diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhul dalam pidatonya dalam peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, bertempat di kantor DPTP PKS, Jakarta, Rabu (17/08).

"Peringatan HUT Kemerdekaan ke-77 RI perlu dimaknai sebagai momentum penting mengevaluasi perjalanan bangsa dan memproyeksikan langkah-langkah perbaikan ke depan. Sudah sejauh mana bangsa kita berhasil mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," ucap Syaikhul.

Syaikhul menyoroti krisis global yang sedang dialami di seluruh dunia pasca pandemi

COVID-19, ia menyebut Indonesia perlu mengantisipasi dalam menghadapi krisis.

"Saat ini bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi krisis global yang nyata. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, ditambah perang Rusia dan Ukraina telah berdampak terjadinya krisis pangan dan energi secara signifikan di berbagai negara," kata dia.

"Situasi tersebut harus menjadi peringatan keras bagi Indonesia agar dapat mengantisipasi ancaman inflasi global yang sudah di depan mata," lanjut Syaikhul.

Syaikhul juga menyinggung, kenaikan harga minyak goreng

serta harga BBM menyulitkan kehidupan rakyat yang masih dalam kondisi pandemi.

"Dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan terjadi kelangkaan minyak goreng dan harganya melambung tinggi. Kita sempat miris emak-emak yang kesulitan untuk memperoleh minyak goreng. Bahkan harus berebutan dan saling sikut sama lain. Kita patut merenung, ternyata untuk mendapatkan hak-hak dasar saja, rakyat masih kesulitan. Bahkan, hari-hari ini masyarakat juga mengeluhkan kenaikan dan harga BBM," imbuh Syaikhul.

Selain ancaman krisis global dan ekonomi, Syaikhul mengingatkan narasi perpecahan tidak boleh dibiarkan karena akan mengancam keutuhan dan menimbulkan disintegrasi bangsa.

"Masalah lainnya adalah ancaman disintegrasi bangsa akibat banyaknya narasi-narasi yang memecah belah yang terus saja diproduksi. Jika ini dibiarkan, maka potensi



**H. AHMAD SYAIKHU**

Presiden PKS

"Saat ini bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi krisis global yang nyata. Pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, ditambah perang Rusia dan Ukraina telah berdampak terjadinya krisis pangan dan energi secara signifikan di berbagai negara,"

perpecahan bangsa akan semakin nyata," kata dia.

"Kita harus bersatu, jangan sampai tenun kebangsaan yang telah susah

payah dirajut oleh para pendiri bangsa, terkoyak-koyak kembali. Mari kita jaga keutuhan NKRI," tandas Syaikhul.

Tanggapi Pidato Kenegaraan  
Presiden RI

# Aleg PKS: Pemerintah Harus Konsisten Buat Kebijakan Pro Rakyat

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang membebani negara dan tak berpihak pada rakyat.

Hal itu disampaikan dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Harapan kami, di hari Kemerdekaan yang ke-77 tahun ini, Pemerintah konsisten dengan apa yang sudah disampaikan di dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI, termasuk juga (konsisten) dengan tema yang diangkat

pada tahun ini, yaitu Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat", ungkap Suryadi.

Menurutnya, agar Indonesia bisa pulih tentu Pemerintah harus mengoordinasikan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan yang selama ini banyak membuat kita sulit untuk pulih, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, termasuk pembangunan infrastruktur.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat II

"Agar Indonesia bisa pulih tentu Pemerintah harus mengoordinasikan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan yang selama ini banyak membuat kita sulit untuk pulih, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, termasuk pembangunan infrastruktur. Seperti proyek kereta cepat, pembangunan IKN, justru sekarang menjadi beban. Sehingga, pulihnya (membutuhkan waktu) lebih lama

# Peringati Kemerdekaan Diah Nurwitasari Ajak Masyarakat dan Pemerintah Bangkit Pasca Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Diah Nurwitasari, mengajak masyarakat untuk kembali bersemangat dalam memulihkan kehidupan baik dalam hal ekonomi maupun sosial pasca pandemi.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Kegiatan Sidang Bersama DPR RI - DPD sekaligus Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022 dalam acara PKS Legislative Report di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Selasa Pagi (16/08).

"Kemerdekaan Indonesia bukan hanya kemerdekaan fisik saja, tetapi termasuk juga merdeka dalam hal ekonomi, sosial serta ideologi yang dimiliki. Apalagi dengan hadirnya kemerdekaan ke-77 ini menjadi sebuah ajang untuk kembali kepada kehidupan yang

lebih baik pasca pandemi setelah 2(dua)tahun mengalami keterpurukan", ujarnya.

Karena itu, imbuhnya, sudah sepatutnya kita kembali bangkit dari keterpurukan yang ada saat ini pun, bukan hanya bangkit ia pun meminta tema yang diambil dalam Sidang Bersama ini diharapkan mampu di implementasikan dengan baik bukan hanya sekedar sebuah tagline semata.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Dipl.Ing. Hj. **DAH**  
**NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat II

"Pulih lebih cepat merupakan tema yang sangat menarik pada kegiatan pasca pandemi ini. Karena, bagaimanapun seluruh masyarakat telah bergotong royong dalam memulihkan keadaannya harapan saya, pemerintah tidak memberikan regulasi atau kebijakan yang justru memperberat para masyarakat".

## Sidang Tahunan MPR

# Aleg PKS Ungkap Makna Kemerdekaan bagi Rakyat

**KUTIPAN**

Jakarta (16/08) - Sidang Tahunan MPR RI Bersama DPR RI - DPD RI yang sekaligus diagendakan juga Rapat Paripurna DPR RI Tentang Penyampaian RUU APBN TA 2023 diselenggarakan pada Selasa (16/08) di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta.

Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almayshari, menyampaikan makna kemerdekaan mengingat momen sidang ini bertepatan dengan satu hari menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun.

"Merdeka itu artinya terbebas dari kemiskinan, penindasan, dan semua yang membelenggu masyarakat Indonesia," ungkap Legislator PKS Dapil Jawa Tengah V ini dalam siaran PKS Legislative Report.

"Merdeka adalah ketika masyarakat Indonesia terbebas dari belenggu tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan lain

sebagainya," sambungnya.

Abdul Kharis turut menuturkan bahwa merdeka bermakna bebas mengekspresikan ide-ide. Selain itu, kesejahteraan, imbuhnya, juga menjadi satu hal yang harus dicapai Indonesia saat ini.

"Saya kira semua presiden akan membawa (kita) pada kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan, harus tercipta keadilan juga. Oleh karenanya, ketika keadilan tercipta, maka akan diikuti oleh kesejahteraan," tegas Abdul Kharis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

"Saya berharap Pemerintah memperhatikan generasi muda ini. Jangan sampai mereka hancur karena narkoba, hancur karena masalah moral. Karena masa depan bangsa ini sangat bergantung pada mereka. Sumber daya manusia kita luar biasa banyak, oleh sebab itu, kita harus bisa memanfaatkan modal penting ini untuk kemajuan Indonesia",

# Maknai Hari Kemerdekaan Iskan Qolba Minta Pemerintah **Beri Perhatian** Pada Generasi Muda

KUTIPAN

Jakarta (16/08) -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menilai peran generasi muda sangat penting guna menyongsong kemajuan Indonesia di masa depan.

Hal itu disampaikan dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-PPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa pagi (16/08).

"Kemerdekaan bangsa kita ini tak bisa dilepaskan dari momentum Sumpah Pemuda. Pada saat itu, anak-anak muda kita bangkit untuk melahirkan satu bangsa yang kita sebut saat ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", ungkap Iskan.

Ia menilai generasi muda saat ini perlu untuk mengambil inspirasi baik dari jejak generasi pendahulu tersebut.

"Saya berharap ke depan, anak-anak muda ini bisa bangkit dalam upaya menjadikan Indonesia masuk lima negara besar dunia dalam beberapa dekade mendatang. Apalagi generasi muda kita saat ini, generasi milenial dan gen Z, menjadi porsi populasi terbanyak, mencapai 55-60 persen", ujarnya.

Terakhir, Iskan meminta Pemerintah untuk berperan dalam menjaga dan mengembangkan potensi generasi muda tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara II

"Saya berharap Pemerintah memperhatikan generasi muda ini. Jangan sampai mereka hancur karena narkoba, hancur karena masalah moral. Karena masa depan bangsa ini sangat bergantung pada mereka. Sumber daya manusia kita luar biasa banyak, oleh sebab itu, kita harus bisa memanfaatkan modal penting ini untuk kemajuan Indonesia",

HUT RI ke-77

# Almuzammil Yusuf: Semua Harus Berjuang Demi Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf, menyampaikan makna kemerdekaan dan harapan bagi negara Indonesia di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-77.

Hal itu diutarakannya dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa pagi (16/08).

"Kemerdekaan itu jembatan menuju adil-sejahtera. Dan adil-sejahtera adalah komitmen PKS sejak pendirian partai. Keadilan dan kesejahteraan harus menjadi cita-cita dan tujuan kita bersama, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, para pakar, para tokoh,

bersama seluruh rakyat, untuk kita perjuangkan", ungkap Muzammil.

Anggota DPR dari Dapil Lampung ini menilai, perayaan HUT RI ke-77 perlu menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa cita-cita untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan belum lah terwujud.

"HUT RI ke-77 harus menjadi peringatan bagi kita bahwa tujuan itu masih sangat jauh dari kata tercapai. Kalau kita bicara adil, misal dalam aspek-aspek hukum, masih banyak kasus yang menjadi

sorotan belakangan ini dan dipertanyakan oleh publik soal penegakan hukumnya. Kalau kita bicara sejahtera, khususnya dalam aspek ekonomi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk meningkatkan ekonomi rakyat", imbuh Anggota DPR dari Dapil Lampung tersebut.

Terakhir, Muzammil menggarisbawahi pentingnya untuk membentuk SDM yang baik dan unggul.

"Terkait Sumber Daya Manusia, sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, cita-cita kita ialah menciptakan SDM yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa. Hal ini yang perlu menjadi catatan bagi kita untuk serius memperjuangkan cita-cita tersebut", pungkasnya.



**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**

Anggota Komisi I DPR RI

"Kemerdekaan itu jembatan menuju adil-sejahtera. Dan adil-sejahtera adalah komitmen PKS sejak pendirian partai. Keadilan dan kesejahteraan harus menjadi cita-cita dan tujuan kita bersama, baik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, para pakar, para tokoh, bersama seluruh rakyat, untuk kita perjuangkan",

# Peringati HUT ke-77 RI, Nasir Djamil: Tujuan Berbangsa dan Bernegara Dalam UUD 1945 **Harus Diwujudkan**

## KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengungkap pandangannya mengenai kemerdekaan serta resolusi yang diharapkan dari peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Kegiatan Sidang Bersama DPR RI-MPR- DPD sekaligus Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022 dalam acara PKS Legislative Report di Gedung MPR DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa pagi (16/08).

Nasir mengungkapkan, bahwa setiap memperingati hari kemerdekaan, kita harus selalu mengingat kembali tujuan berbangsa dan bernegara yakni melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Ia menuturkan, bahwa sudah seharusnya di setiap momen kemerdekaan,

seluruh masyarakat Indonesia menghayati ketiga tujuan negara tersebut.

"Memaknai kemerdekaan, yang harus kita lihat ialah sejauh mana negara dan kita semua mengakomodir dan mengimplementasikan ketiga tujuan tersebut?", ujarnya dengan tegas.

Ia pun menuturkan bahwa menurut hasil survey yang diperolehnya, sebesar 70% masyarakat belum mampu merasakan kesejahteraan sebagaimana yang mereka inginkan. Artinya, peran negara saat ini masih belum maksimal.

"Kita semua tahu, bahwa

Indonesia ini terdiri dari jumlah masyarakat yang heterogen dan majemuk justru, hal tersebut merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh negara mengenai bagaimana peran negara bisa hadir setiap sudut sudut negeri sehingga, bendera merah putih bukan hanya berkibar di halaman sekolah saja, namun bisa dirasakan perwujudan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan disana lah peran kepemimpinan negara yang terintegrasi dengan kuat", ujarnya dengan sangat tegas.

Menutup pernyataannya, Nasir Djamil berharap bahwa negara senantiasa mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

"Masyarakat perlu merasakan kehadiran negara di lingkungan mereka dan memiliki rasa untuk menjaga, mempersatukan, serta membangun Negara Indonesia menuju arah yang jauh lebih baik lagi", pungkasnya.



## H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

“Setiap memperingati hari kemerdekaan, kita harus selalu mengingat kembali tujuan berbangsa dan bernegara yakni melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Ia menuturkan, bahwa sudah seharusnya di setiap momen kemerdekaan, seluruh masyarakat Indonesia menghayati ketiga tujuan negara tersebut”



Sambut Kemerdekaan RI ke-77

# PKS: Indonesia adalah Negara yang Besar, Kuat, dan Penuh Potensi

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly mengungkapkan rasa optimismenya terhadap kegemilangan Indonesia di tengah momen perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 tahun.

Hal itu disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Report ketika hendak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tahun 2022 di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa pagi (16/08).

"Alhamdulillah kita telah memasuki usia yang ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar. Ini adalah momentum kita untuk bangkit dengan melakukan perbaikan-perbaikan," tegas Junaidi.

"Masa pandemi sudah hampir berlalu. Pandemi memang masih ada, tetapi itu

adalah sebuah ujian bagi kita. Marilah kita hadapi, kita harus bangkit, kita yakin Allah SWT akan menolong dan melindungi kita," sambungnya.

Legislator Fraksi PKS dari Dapil Lampung II ini menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan siap untuk maju ke depan.

"Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia punya potensi yang besar. Oleh karenanya, Indonesia yang besar benar-benar diwujudkan dalam kenyataannya.

Masyarakat dan pemerintah kian kuat, kemudian dari segi keamanan pun semakin mantap," pungkasnya.



## H. ALIFUDIN, S.E., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia punya potensi yang besar. Oleh karenanya, Indonesia yang besar benar-benar diwujudkan dalam kenyataannya. Masyarakat dan pemerintah kian kuat, kemudian dari segi keamanan pun semakin mantap,"

HUT Kemerdekaan RI ke-77

# Aleg PKS Gaungkan Kolaborasi dalam Membangun Bangsa

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar menyatakan rasa syukur sebab Indonesia telah merdeka selama 77 tahun.

Hal itu disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Report saat hendak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI- DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tahun 2022 pada Selasa (16/08) di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Selamat untuk Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-77 tahun. Umur yang sangat dewasa bahkan sudah tua kalau untuk manusia," ucap Ansory.

"Mungkin sebentar lagi juga kurang lebih 33 tahun lagi sudah 1 abad. Jadi kita (harus) bersyukur sekali atas sampainya umur yang ke-77 tahun ini," sambungnya.

Legislator PKS Dapil Sumatera Utara III ini mendorong terciptanya

semangat kolaborasi dari segala unsur dan lintas kalangan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih maju lagi.

"Harapannya, semangat untuk berkolaborasi, membangun bangsa Indonesia dari segala unsur, dari segala lintas agama, komunitas, maupun partai," terang Ansory.

Ansory berharap agar seluruh elemen masyarakat beserta pemerintah dapat mewujudkan Indonesia yang maju melalui langkah kolaborasi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

**H. ANSORY SIREGAR, Lc,**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Utara III

Marilah kita berkolaborasi. Kolaborasi dari pemerintah, kolaborasi dari semua unsur penting dalam negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ditambah unsur lainnya untuk membangun bangsa Indonesia ke depan”

Maknai Perayaan HUT RI ke-77,

# Aus Hidayat Nur: Bangsa Ini Harus Merdeka di Seluruh Lini Kehidupan

## KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur, memaknai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 sebagai momentum untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat dalam segala aspek kehidupan.

Hal itu disampaikannya dalam acara PKS Legislative Report saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa pagi (16/08).

"Kita ingin agar kemerdekaan Indonesia ini betul-betul memerdekakan jiwa, pemikiran, ekonomi, dan keseluruhan aspek kehidupan manusia dan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita hanya merdeka secara fisik, tetapi secara pemikiran, ekonomi, sosial, dan politik kita di bawah penjajahan asing", ujar Aus.

"Kemerdekaan bagi PKS adalah bagaimana rakyat Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri untuk masa depannya yang lebih baik dan lebih sejahtera", imbuh Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur itu.

Aus pun berharap agar generasi muda terus berperan dalam menghidupkan kemerdekaan Indonesia

"Kami ingin agar generasi muda untuk selalu menghargai para pahlawan, serta senantiasa berjuang untuk terus mengisi kemerdekaan negara Indonesia", pungkasnya.



## KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Timur

"Kita ingin agar kemerdekaan Indonesia ini betul-betul memerdekakan jiwa, pemikiran, ekonomi, dan keseluruhan aspek kehidupan manusia dan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita hanya merdeka secara fisik, tetapi secara pemikiran, ekonomi, sosial, dan politik kita di bawah penjajahan asing

Respon Pidato Kenegaraan  
Presiden RI

# Ledia Hanifa: Pemerintah Harus Buktikan Dukungan pada Pemuda

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, meminta Pemerintah untuk meningkatkan anggaran bagi sektor kepemudaan.

Hal itu disampaikan dalam acara PKS Legislative Report guna menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI- DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Kita sudah bersama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tadi. Beliau berkali-kali menyebutkan tentang bonus demografi, tentang banyaknya anak-anak muda yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Itu harus dibuktikan, perhatian Presiden

tersebut, melalui peningkatan anggaran kepemudaan", ungkap Ledia.

"Karena, (saat ini) Kemendikpora, anggaran olahraganya lebih besar ketimbang anggaran untuk pemuda. Harusnya diganti (nomenklaturnya) jadi Kementerian Olahraga dan Pemuda kalau yang terjadi adalah seperti itu", jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Ledia pun meminta Pemerintah meningkatkan perhatian dan dukungan para anak muda di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si, M.Psi.T**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

"Kita sudah bersama mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tadi. Beliau berkali-kali menyebutkan tentang bonus demografi, tentang banyaknya anak-anak muda yang harus diperhatikan dan dikembangkan. Itu harus dibuktikan, perhatian Presiden tersebut, melalui peningkatan anggaran kepemudaan",

# Ketua Fraksi PKS DPR: Kemerdekaan Bermakna NKRI Berdaulat - Rakyat Sejahtera, Adil, dan Makmur

## KUTIPAN

Jakarta (17/08) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan kemerdekaan harus dimaknai sebagai semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta mewujudkan Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

"Kemerdekaan Indonesia harus menjadi jembatan emas untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Maksudnya rakyat Indonesia sejahtera ekonomi, politik, dan budaya. Konkritnya lapangan kerja terbuka luas, UMKM tumbuh dan berdaya, demokrasi makin substantif, dan nilai-nilai luhur bangsa makin kuat dipedomani sebagai karakter bangsa," ungkap Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, Indonesia saat ini menghadapi tantangan kebangsaan yang tidak mudah. Pandemi covid 19 belum berakhir. Sementara krisis

global menghantui di berbagai bidang : politik, ekonomi, energi hingga lingkungan.

"Kunci keberhasilan kita menghadapi tantangan tersebut adalah semangat gotong royong, kerjasama, dan kolaborasi. Inilah jati diri bangsa Indonesia, yang selalu berusaha mencari titik temu lalu membangun kolaborasi kebangsaan untuk menghadapi semua peluang dan tantangan," tandas Jazuli.

Satu hal yang diingatkan oleh Anggota DPR Dapil Banten ini, era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif.

Kita harus mampu menguasai kemajuan teknologi informasi. Pada saat yang sama kita harus waspada infiltrasi ideologi atau paham dominan yang melunturkan karakter dan jati diri bangsa," tandasnya.

Diantara yang perlu diwaspadai yaitu pengaruh kuat paham/ideologi liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme termasuk paham yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa seperti terorisme dan sparatisme. Paham dan ideologi tersebut bukan saja tidak sejalan tapi bertentangan dengan jati diri bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945.

"Waspada jangan sampai kita terbawa arus ideologi dominan, karena dampaknya sangat serius. Secara ideologi dan budaya kita menjadi lemah, politik kita tak jelas arah dan terbelah, sementara ekonomi tergadai arus liberalisasi yang jauh dari semangat ekonomi kerakyatan. Rakyat pun jauh dari asa untuk sejahtera, adil, dan makmur," tegas Jazuli.

Untuk itu, Jazuli Juwaini mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkuat jati



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**"Kita harus mampu menguasai kemajuan teknologi informasi. Pada saat yang sama kita harus waspada infiltrasi ideologi atau paham dominan yang melunturkan karakter dan jati diri bangsa,"**

diri budaya bangsa yaitu dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam dimensi kebijakan dan perilaku hidup sehari-hari.

"Itulah cara kita menjaga anugerah kemerdekaan. Agar

negara dan bangsa Indonesia kuat dan berdaulat, rakyatnya sejahtera, adil dan makmur. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Merdeka!," pungkas Jazuli.

# Politisi PKS: Pidato Kenegaraan Presiden Belum Sebutkan Exit Strategi dari Pandemi

## KUTIPAN

Jakarta (17/08) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati menanggapi Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Presiden menyebut Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, dengan beberapa indikator salah satunya lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia.

Presiden Jokowi juga menegaskan jika Indonesia mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti juga pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik.

Menurut Kurniasih, semangat peringatan HUT 77 Republik Indonesia adalah spirit Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat. Dalam kacamata kesehatan, menurut Kurniasih Presiden Joko Widodo tidak menyebut secara eksplisit tentang exit strategi bagaimana Indonesia bisa menuju status

endemi.

"Jika Presiden menegaskan Indonesia berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, maka perlu disebutkan langkah ke depan bagaimana exit strategi bagaimana transisi pengendalian krisis pandemi Covid-19 menuju persiapan status endemi jika nanti ditetapkan oleh WHO. Indonesia sudah harus siap," papar Kurniasih dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).

Pada paparan rencana ke depan, Presiden Joko Widodo tidak menyebut secara gamblang dan menyentuh sisi pengendalian pandemi. Pada program kesehatan pun yang disebut juga sangat singkat yakni stunting harus cepat dipangkas dan layanan

promotif, preventif serta pengobatan harus semakin kuat dan merata.

"Pada sektor lain ada titik tekan ke depan mulai dari penyebutan industri, pangan, UMKM hingga politik, hukum dan keamanan. Tapi porsi kesehatan masih minim disebutkan. Padahal kita dalam konteks pulih dari krisis kesehatan dan bangkit dalam penanganan persoalan kesehatan lainnya yang terhenti karena pandemi," ungkap Kurniasih.

Meski begitu, Kurniasih menyebut penyebutan penanganan stunting oleh Presiden Joko Widodo harus diapresiasi dengan perwujudan program implementasi yang konkrit.

Anggaran untuk penanggulangan stunting perlu ditingkatkan terutama yang dialokasikan untuk BKKBN yang sudah ditunjuk sebagai leading sector penanggulangan stunting.

"Pemulihan sektor kesehatan harus jadi prioritas. Harus belajar dari lemahnya ketahanan sistem kesehatan kita saat pandemi, termasuk



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

**“Jika Presiden menegaskan Indonesia berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, maka perlu disebutkan langkah ke depan bagaimana exit strategi bagaimana transisi pengendalian krisis pandemi Covid-19 menuju persiapan status endemi jika nanti ditetapkan oleh WHO. Indonesia sudah harus siap”**

penyediaan alkes dan obat-obatan. Keseriusan pemerintah dalam menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk bisa mengejar target SDGs maupun

nasional dengan memulihkan lagi pelayanan unit terdapan kesehatan ibu dan anak seperti Posyandu dan Puskesmas,” ungkap dia.

# Maknai Hari Kemerdekaan

## Aleg PKS: Prinsip Keadilan, Kesejahteraan, dan Kemakmuran Jadi Hal Penting

### KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty menyatakan bahwa penegakan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran menjadi makna tersendiri bagi Kemerdekaan Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan pada siaran langsung PKS Legislative Corner siang tadi di Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPR RI di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, (16/08).

"Bagi saya, makna kemerdekaan mengacu pada proses dari penegakan berbagai prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kita memang sudah merdeka dari penjajah, sehingga saat inilah waktunya untuk kita yang berusaha memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di sektor-sektor riil." Ungkap

Saadiah.

Saadiah mengatakan SDA dan berbagai potensi kekayaan alam kita memang memiliki potensi yang besar. Potensi tersebutlah yang seharusnya dapat dimanfaatkan agar dapat berdampak besar bagi masyarakat.

"Potensi tersebut harus menjadi tiger untuk dapat membantu kita memulihkan ekonomi Indonesia yang kemarin sempat terhambat akibat dampak Pandemi Covid-19."

Anggota Fraksi PKS DPR RI ini juga turut menyampaikan

harapannya terhadap pemerintah agar apa yang diungkapkan pada sidang tadi dapat sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

"Terkait harga minyak yang disampaikan pada pidato tadi terus mengacu pada bantuan subsidi BBM besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, apabila hal tersebut benar dilakukan mengapa tetap terjadi kelangkaan bahan bakar maupun berbagai persoalan lainnya," tambah Saadiah.

"Ini adalah potret yang terjadi di masyarakat kita saat ini, yang harus menjadi catatan bagi pemerintah." tutupnya.



### SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

"Bagi saya, makna kemerdekaan mengacu pada proses dari penegakan berbagai prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kita memang sudah merdeka dari penjajah, sehingga saat inilah waktunya untuk kita yang berusaha memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di sektor-sektor riil."

Harapan di HUT RI ke-77

# Aleg PKS: Pemerintah Wajib Perhatikan Sektor Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

## KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, memberikan pendapatnya terkait dengan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Kegiatan Sidang Bersama DPR RI - MPR RI - DPD RI sekaligus Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022 dalam acara PKS Legislative Report di Gedung MPR DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa Siang (16/08).

Menurutnya, pidato pada hari ini kurang proporsional dan hanya menyorot beberapa isu yang berfokus pada prestasi atau target sasaraannya, tetapi seharusnya dalam pidato tersebut menyebutkan 2 (dua) isu krusial yakni pendidikan tentang kurikulum merdeka serta ekonomi kreatif tentang recovery pariwisata pasca

pandemi.

Dalam hal ini, Fikri menuturkan bahwa seharusnya Presiden RI pun menyoroti perihal tantangan yang dihadapinya, bukan hanya sekedar prestasinya karena bagaimana pun tantangan tersebut akan mempengaruhi hasil yang dicapai.

"Bagi saya, dua isu krusial tersebut sudah seharusnya dicantumkan dalam pidato kenegaraan tadi melihat isu pendidikan tentang kurikulum merdeka memberikan keamanan serta menjamin seluruh masyarakat bisa sekolah mulai dari jenjang SD-SMA. Selain itu, untuk ekonomi

kreatif dan pariwisata menjadi amat penting melihat kejadian di masa pandemi sektor tersebut menjadi sektor yang membantu menyumbang pemulihan situasi ekonomi saat itu", ujarnya.

Terlepas dari persoalan tersebut, ia menambahkan bahwa kemerdekaan itu merupakan sebuah hal yang asasi yang artinya semua pihak harus mampu merasakan yang namanya merdeka salah satunya dengan merdeka belajar.

Akhir kata, Fikri menyampaikan untuk tetap bersyukur pada Allah SWT. karena kemerdekaan yang ke-77 tahun merupakan kuasa atas bantuan Allah SWT agar kita bisa hidup adil, makmur dan sejahtera dalam keberkehidupan.



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX

"Bagi saya, dua isu krusial tersebut sudah seharusnya dicantumkan dalam pidato kenegaraan tadi melihat isu pendidikan tentang kurikulum merdeka memberikan keamanan serta menjamin seluruh masyarakat bisa sekolah mulai dari jenjang SD-SMA. Selain itu, untuk ekonomi kreatif dan pariwisata menjadi amat penting melihat kejadian di masa pandemi sektor tersebut menjadi sektor yang membantu menyumbang pemulihan situasi ekonomi saat itu"



Tanggapan Pidato  
Kenegaraan Presiden RI

## Netty: Jangan Sekadar Angka, Harus Dilihat Faktanya

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani, menuturkan pandanganterkait kemerdekaan.

Pandangan tersebut disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Corner setelah mengikuti agenda Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/08).

"Merdeka bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, namun merdeka adalah kemampuan kita mengendalikan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan bagi hadirnya kemajuan dan kesejahteraan Indonesia," terang Netty sebagai pembuka.

Netty turut menanggapi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo. Baginya, penyampaian pidato presiden bukan sekadar

angka, melainkan harus dilihat fakta empiriknya.

"Pandemi Covid-19 belum selesai bahkan ada sub-varian baru yang masih menjadi ancaman global, termasuk bagi negara Indonesia," tegas Legislator PKS asal Jawa Barat ini.

"Dampak pandemi ini luar biasa hingga sektor ekonomi sempat berkontraksi. Kemudian, banyak pekerja yang mengalami PHK," sambungnya.

Bagi Netty, permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sinyal bagi Joko Widodo selaku presiden yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2024.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

"Saya pikir beliau (Presiden Joko Widodo) harus meninggalkan kerja-kerja monumental dan fundamental serta memulihkan ekonomi, sehingga InsyaAllah masyarakat Indonesia memiliki kebanggaan pada kepemimpinan beliau,"

Peringati Kemerdekaan RI ke-77

# Mulyanto: Kemerdekaan Sesungguhnya adalah Kesejahteraan Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan usia Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 menandakan bahwa negara kita sudah dewasa dan sudah seharusnya untuk mengambil langkah-langkah yang semakin cermat.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Kegiatan Sidang Bersama DPR RI - MPR RI - DPD RI sekaligus Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022 dalam acara PKS Legislative Report di Gedung MPR DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa Siang. (16/08).

Mulyanto mengapresiasi tema yang diambil dalam menyambut HUT RI Kemerdekaan yang ke-77 yakni 'Cepat Pulih dan Kuat Bangkit'.

Menurutnya, tema tersebut bukan hanya semata-mata bertujuan untuk mengembalikan semangat masyarakat pasca pandemi, tetapi juga mengingatkan

Pemerintah untuk tetap berhati-hati dan waspada mengenai kondisi ke depan.

"77 Tahun termasuk dalam usia yang dewasa, sehingga Pemerintah harus semakin cermat dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi", ujarnya.

Lebih lanjut Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten III ini menambahkan bahwa kondisi Indonesia saat ini tak lepas dari berbagai masalah.

"Bagaimana pun, masih ada inflasi yang terus meningkat, harga pangan dan migas yang semakin tinggi, serta masalah sektor lainnya yang akan dihadapi oleh

Pemerintah", terang Mulyanto. Ia berharap agar kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan nantinya tidak memberatkan masyarakat bahkan mempersulit masyarakat dalam merasakan makna kemerdekaan yang sebenarnya.

"Merdeka itu makna-nya bermacam-macam, tetapi bagi saya, masyarakat akan merasa merdeka ketika kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dan yang paling penting, tidak memberatkan mereka. Kalau masih memberatkan, seperti harga LPG yang masih terus meningkat dan cenderung langka artinya negeri ini belum sepenuhnya merdeka", ungkapnya dengan tegas untuk menutup pembicaraannya pada agenda PKS Legislative Corner siang tadi.



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Merdeka itu makna-nya bermacam-macam, tetapi bagi saya, masyarakat akan merasa merdeka ketika kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dan yang paling penting, tidak memberatkan mereka. Kalau masih memberatkan, seperti harga LPG yang masih terus meningkat dan cenderung langka artinya negeri ini belum sepenuhnya merdeka",

## Respon Pidato Kenegaraan Presiden RI, **Adang Daradjatun:** **Masih Banyak Masalah** **yang Perlu Dapat Perhatian**

### KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyoroti penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,

dalam Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta. (16/08)

"Tidak salah apabila Presiden menyoroti berbagai hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan-kemajuan tentang pemerintahan, dan sebagainya. Tapi, di sisi lain kita sebagai anggota dewan juga masih melihat beberapa-beberapa kelemahan-kelemahan yang ada", ujar Mantan Wakapolri ini.

Adang menilai apa yang disampaikan presiden juga tidak secara realistis mengungkap semua masalah secara menyeluruh.

"Kita ingin menempatkan diri sebagai pemerhati maupun

sebagai elemen yang mengontrol jalannya pemerintah. Apa yang disampaikan presiden juga tidak semuanya benar, masih terdapat masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian lebih terutama dalam konteks mencerdaskan bangsa maupun memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia", tambah Adang.

Adang turut juga mengungkapkan, bahwa dalam memaknai momen kemerdekaan ini kita harus mengakui bahwa kemajuan-kemajuan dalam bernegara tidak dipungkiri memang terus berkembang ke arah yang semakin baik.

"Selama 77 tahun kita merdeka, kita harus mengakui

bahwa kemajuan-kemajuan dalam berbangsa dan bernegara semakin baik. Kita juga harus berterimakasih kepada 'founding fathers', yang telah memberikan garis-garis arah gambaran ke arah mana bangsa dan negara ini dibawa", ungkapnya lagi.

"Untuk itu, bagi saya makna dari kemerdekaan ini kita seakan diingatkan untuk kedepannya dapat membangun arah dari bangsa dan negara yang semakin baik", tutupnya.

”



**Drs. H. ADANG DARADJATUN**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Selama 77 tahun kita merdeka, kita harus mengakui bahwa kemajuan-kemajuan dalam berbangsa dan bernegara semakin baik. Kita juga harus berterimakasih kepada 'founding fathers', yang telah memberikan garis-garis arah gambaran ke arah mana bangsa dan negara ini dibawa",

Tanggapi Pidato Kenegaraan  
Presiden RI,

## Sekjen PKS: **Rasanya** Tak Ada Kesulitan di Republik Ini

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengutarakan pandangannya mengenai kemerdekaan.

Hal itu disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Corner pasca mengikuti agenda Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/08).

"Makna kemerdekaan itu bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," ucap Habib Aboe.

Habib Aboe optimis bahwa Republik Indonesia berada dalam kondisi baik. Pernyataan itu tercermin dalam tanggapannya terhadap pidato kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo.

"Kalau dengar pidato presiden tadi rasanya tidak ada kesulitan di Republik ini. Semua

serba bahagia, ditandai dengan kenaikan atau surplus 2 triliun. Tinggal kita buktikan saja di lapangan nanti," tegas Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.

Habib Aboe turut menyampaikan pesan untuk anak muda. Anak muda di NKRI ini, katanya, harus terdorong untuk membangun nasib baik bagi bangsa.

"Kemudian, terus tumbuhkan budaya gotong royong untuk Indonesia yang lebih baik lagi," tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.



**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Sekjen DPP PKS

"Kalau dengar pidato presiden tadi rasanya tidak ada kesulitan di Republik ini. Semua serba bahagia, ditandai dengan kenaikan atau surplus 2 triliun. Tinggal kita buktikan saja di lapangan nanti"

## Sindir Pidato Kenegaraan Presiden RI, **Mustafa Kamal: Cenderung Puji Diri Sendiri dan Belum Sajikan Data Lengkap**

### ● KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, menyebut Pemerintah hanya memaparkan data-data baik yang dipunya saja, tanpa menyajikan data dan fakta lain sebagai penyeimbang.

Hal itu disampaikannya dalam acara PKS Legislative Report guna menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Banyak bunga-bunga yang disampaikan oleh Pemerintah. Memuji diri sendiri. Itu saya kira bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun, semua itu juga harus disertai dengan angka-angka yang lebih objektif dan berimbang. Percaya diri itu perlu, tetapi harus hati-hati juga penting", ujar Mustafa.

Menurutnya, kondisi geopolitik saat ini sangat tidak

menentu. Selain itu, ketidakstabilan bukan hanya datang dari luar, melainkan stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri juga bermasalah.

"Kita punya masalah separatisme di Papua, kita punya masalah di lembaga-lembaga negara kita, termasuk yang sekarang sedang ramai dan (rasanya) memerlukan reformasi adalah Kepolisian Republik Indonesia, yang dirundung permasalahan berat terkait integritas", ungkapnya lagi.

Mustafa Kamal pun mengkritik data pertumbuhan ekonomi yang dipaparkan oleh Presiden dalam pidatonya pagi tadi.

"Angka-angka

pertumbuhan ekonomi yang tadi disebut Presiden, sebenarnya masih dalam proses yang sangat turbulensi. Jangan salah, pertumbuhan ekonomi kita bisa terkoreksi lagi. Utang negara masih besar. Kemudian, masalah pertanian, kita swasembada beras, tapi petani masih menjerit, nelayan masih menderita. Masalah-masalah masih banyak sekali", tegasnya.

Ia pun menyinggung Pemerintah yang justru kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia.

"Persoalan ekonomi kreatif, pariwisata, dan pendidikan juga kurang disinggung oleh Presiden dalam pidato kenegaraannya. Konsentrasi pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan, seharusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah. Sekarang kesannya kita disuruh bekerja untuk pembangunan, tetapi sumber daya manusia Indonesia tidak betul-betul ditingkatkan oleh Pemerintah", pungkasnya.



**H. MUSTAFA KAMAL, S.S.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Selatan I

"Banyak bunga-bunga yang disampaikan oleh Pemerintah. Memuji diri sendiri. Itu saya kira bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri. Namun, semua itu juga harus disertai dengan angka-angka yang lebih objektif dan berimbang. Percaya diri itu perlu, tetapi harus hati-hati juga penting",

Tanggapi Pidato Kenegaraan  
Presiden RI,

# Aleg PKS **Apresiasi** Capaian Indonesia Melawan Pandemi

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian Indonesia dalam melawan pandemi.

Hal itu disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Corner setelah mendengarkan pidato kebangsaan Presiden RI pada agenda Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPRD RI di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (16/08).

Dalam uraiannya, Alifudin mengapresiasi posisi Indonesia yang masuk lima besar sebagai negara yang mampu menangani pandemi Covid-19.

"Kami (Komisi IX) sangat intens dalam membaca perkembangan pandemi covid-19. Kami sangat bahagia saat Indonesia mampu mengatasi persoalan pandemi yang sangat luar biasa," ungkap Legislator PKS dari Dapil Kalimantan Barat I ini.

"Indonesia bisa melewati masa-masa sulit dan kita harapkan pandemi segera berakhir menjadi endemi," ujarnya lebih lanjut.

Di saat yang sama, Alifudin juga menyampaikan harapannya untuk Indonesia ke depan.

"Alhamdulillah kita telah 77 tahun merdeka, tentu saja ini menumbuhkan makna yang luar biasa. Diharapkan bangsa ini menjadi lebih besar lagi," kata Alifudin sebagai pembuka.

"Tahun 2045 nanti negara ini sudah masuk 100 tahun, berarti ada waktu 23 tahun untuk masa persiapan menuju bangsa yang gemilang.

Kemudian, tahapan pemilu sudah dimulai, diharapkan lahir pemimpin yang lebih baik lagi," sambungnya.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Pada momen kemerdekaan saat ini ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun hubungan yang baik guna dapat secara bersama-sama membangun pembangunan yang terus tumbuh dan berkembang. Termasuk dalam hubungan-hubungan antar masyarakat kita sehingga dapat mengisi pembangunan secara normal dengan terus tumbuh dan berkembang.

## Hari Kemerdekaan RI ke-77 **Aleg PKS Berharap Swasembada dan Kedaulatan Pangan**

### KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, menyatakan harapannya terkait adanya swasembada dan kedaulatan pangan dalam mengisi Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun.

Hal itu disampaikan dalam siaran langsung PKS Legislative Report setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tahun 2022 pada Selasa (16/08) di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Tentunya, untuk mengisi hari kemerdekaan ini kita berharap ada swasembada dan kedaulatan pangan guna dapat terbebas dari impor dan mulai mengkonsumsi dari apa yang kita produksi sendiri." ucap Hermanto .

Dalam merespon pidato yang diungkapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada sidang hari ini, legislator PKS Dapil Sumatera Barat I tersebut juga berharap akan adanya semangat nasionalisme baru

dari seluruh kalangan baik masyarakat maupun pemerintah agar Indonesia tetap selalu terus terjaga dan terpelihara.

"Tentunya kita harus memberikan adanya semangat baru untuk nasionalisme kita supaya Indonesia ini tetap terjaga dan terpelihara baik secara sosial maupun budaya" pungkasnya.

Hermanto juga menambahkan, pada momen kemerdekaan saat ini ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun hubungan yang baik guna dapat secara bersama-sama membangun pembangunan yang terus tumbuh dan berkembang.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



### **Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

"Pada momen kemerdekaan saat ini ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun hubungan yang baik guna dapat secara bersama-sama membangun pembangunan yang terus tumbuh dan berkembang. Termasuk dalam hubungan-hubungan antar masyarakat kita sehingga dapat mengisi pembangunan secara normal dengan terus tumbuh dan berkembang.

# Tanggapi Pidato Presiden RI, Aleg PKS Minta Pemerintah Hentikan Proyek Non-Prioritas

## KUTIPAN

Jakarta (18/06) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin AK, meminta Pemerintah fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi rakyat dan menghentikan sejumlah proyek yang belum prioritas.

Hal itu disampaikan dalam acara PKS Legislative Report guna menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Kita apresiasi pencapaian yang telah diraih oleh Pemerintah, tetapi kita juga masih prihatin dengan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah kemungkinan naiknya harga BBM subsidi", ungkap Amin AK.

Menurut Anggota DPR dari Dapil Jember dan Lumajang ini, kenaikan harga BBM tentu

memeratkan rakyat.

"Hal ini berpotensi menurunkan level kesejahteraan 67 persen rakyat Indonesia yang miskin dan rentan miskin", jelasnya.

Selain itu, Amin AK mengkritik Pemerintah yang banyak menjalankan proyek strategis nasional, padahal menurutnya itu belum prioritas.

"Seperti IKN, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang tadinya (KCJB) dijanjikan tidak menggunakan anggaran negara, tapi ujungnya pakai APBN juga.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## AMIN AK, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Jawa Timur IV

"Pemerintah yang banyak menjalankan proyek strategis nasional, padahal menurutnya itu belum prioritas. Seperti IKN, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang tadinya (KCJB) dijanjikan tidak menggunakan anggaran negara, tapi ujungnya pakai APBN juga. Dan masih banyak proyek strategis lain yang belum prioritas bagi kepentingan masyarakat, tetapi malah membebani keuangan negara"



Peringati Hari Kemerdekaan RI

# Aleg PKS Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan

KUTIPAN

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes, meminta Pemerintah fokus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam acara PKS Legislative Report guna menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08).

"Hal yang perlu kita garisbawahi, kita masih harus bekerja keras untuk menjadikan Indonesia mencapai cita-cita, sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa ini. Dan yang pertama dan paling utama adalah kita harus pastikan masyarakat kita itu memiliki kecerdasan melalui pendidikan", ujar Fahmy.

Menurut Fahmy, kecerdasan ini menjadi modal

utama bagi bangsa Indonesia untuk berdaulat dan bermartabat, dan menjadi penopang utama bagi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, imbuhnya lagi, pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

"Saya berharap, pesan-pesan kemerdekaan yang disampaikan oleh Presiden, seharusnya berorientasi pada upaya nyata, karena masih banyak masalah dalam pendidikan kita. Bukan sekadar melakukan proses pembangunan fisik, tetapi pembangunan SDM haruslah menjadi panglima. Panglima pembangunan adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional", pungkasnya.



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V

"Hal yang perlu kita garisbawahi, kita masih harus bekerja keras untuk menjadikan Indonesia mencapai cita-cita, sebagaimana diharapkan oleh para pendiri bangsa ini. Dan yang pertama dan paling utama adalah kita harus pastikan masyarakat kita itu memiliki kecerdasan melalui pendidikan",

Apresiasi Pidato Kenegaraan Presiden RI

## Ketua FPKS: Wajib Diimplementasikan dan Dirasakan Rakyat

### KUTIPAN

Jakarta (16/08) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengapresiasi penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPD RI sekaligus Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2022, di Gedung MPR-DPR, Senayan Jakarta, pada Selasa, (16/08).

Menurutnya, pidato Presiden sangat bagus. Namun, ia meminta agar Presiden beserta Pemerintah mampu mengimplementasikan apa yang dipaparkan dalam pidato tersebut.

"Saya rasa semua pidato akan bagus, apalagi sekelas Presiden RI, saya yakin pidatonya sangat-sangat bagus. Namun, tidak semua pidato yang bagus memiliki feedback yang baik juga. Oleh karenanya, implementasi dari pidato tersebut harus berdampak pada masyarakat karena itulah

makna kemerdekaan yang sebenarnya", ungkap Jazuli.

Pimpinan Fraksi PKS itu menjelaskan, bahwa peringatan kemerdekaan tahun ini perlu menjadi bahan evaluasi, sejauh mana kinerja Pemerintah dalam melayani warganya.

"Selagi masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan kemiskinan masih menjalar, maka dapat disimpulkan bahwa pidato yang disampaikan Bapak Presiden belum dapat dikatakan

kemerdekaan. Mengingat, makna merdeka yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat mampu merasakan kebutuhan yang memang mereka butuhkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi", ujarnya.

Menutup keterangannya, Jazuli berharap bahwa apa yang telah disampaikan Presiden RI dalam pidatonya tadi mampu diwujudkan agar seluruh masyarakat bisa merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.

"Menjadi sebuah catatan yang penting, karena bagaimana pun, makna kemerdekaan sangat erat dengan hak asasi manusia, kehidupan ekonomi politik, maupun segala bidang yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Jika seluruh kebutuhan tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain", pungkasnya.



**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

"Selagi masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan kemiskinan masih menjalar, maka dapat disimpulkan bahwa pidato yang disampaikan Bapak Presiden belum dapat dikatakan kemerdekaan. Mengingat, makna merdeka yang sesungguhnya adalah ketika masyarakat mampu merasakan kebutuhan yang memang mereka butuhkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi",

Maknai Kemerdekaan Indonesia

# Aleg PKS: Keadilan Jangan Lagi Jadi Barang Mahal di Indonesia

## KUTIPAN

Sukamta turut menyampaikan masukan terhadap pemerintah agar semakin konsisten dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta direalisasikan secara merata. Semua lapisan masyarakat, tegasnya, harus dijangkau mulai dari kelas bawah hingga menengah.

Jakarta (16/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menyatakan bahwa Kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas dalam mewujudkan cita-cita bangsa berupa masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pernyataan tersebut disampaikan pada siaran langsung PKS Legislative Corner setelah menghadiri Sidang Tahunan MPR RI-DPR RI-DPRD RI di Gedung MPR-DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa siang (16/08).

"Di usia yang ke-77 tahun ini kita punya pondasi kebangsaan yang bagus,

pembangunan yang bagus, dan pertumbuhan perekonomian yang stabil di tengah situasi dunia yang tidak bagus secara politik dan ekonomi," ucap Sukamta sebagai pembuka.

Sukamta berharap agar proses demokratisasi semakin matang dan dewasa, sehingga bangsa Indonesia semakin kuat, Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh, dan jangan sampai ada komponen-komponen anak bangsa yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

"Diharapkan keadilan di negeri ini tidak lagi menjadi barang mahal. Kesejahteraan juga mudah-mudahan tambah

bagus dan merata di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya milik elit ekonomi maupun elit sosial-politik," tegas Anggota DPR RI Dapil DI Yogyakarta ini.

"Mudah-mudahan eksistensi Indonesia kian kokoh dan terus bertahan sampai akhir zaman," sambungnya.

Sukamta turut menyampaikan masukan terhadap pemerintah agar semakin konsisten dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta direalisasikan secara merata. Semua lapisan masyarakat, tegasnya, harus dijangkau mulai dari kelas bawah hingga menengah.

"Seluruh kalangan harus mendapat 'kue' tahunan ekonomi yang lebih baik, mulai dari kelas bawah, menengah, hingga puncak (kelas atas). Biar bagaimanapun, seluruh lapisan masyarakat adalah tulang punggung ekonomi negara Indonesia," pungkas Sukamta.



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DI Yogyakarta

"Diharapkan keadilan di negeri ini tidak lagi menjadi barang mahal. Kesejahteraan juga mudah-mudahan tambah bagus dan merata di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya milik elit ekonomi maupun elit sosial-politik,"

# 17 Tahun MoU Helsinki, Rafli Kande Urai Pesan Pembangunan Aceh

## KUTIPAN

Banda Aceh (17/08) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli pada Peringatan Hari Damai Aceh ke 17, selain mengutarakan strategi pembangunan Aceh yang disampaikan melalui syair,

ia juga beorasi menyampaikan sejumlah isu teranyar di tengah masyarakat Provinsi paling barat Indonesia itu, Senin (15/08/2022) di Banda Aceh.

Melengkapi pesan pembangunan Aceh melalui syair Asai Nanggroe, Politisi PKS di Komisi VI itu mengatakan, Tanah yang sudah bersertifikat, akan dibuat hubungan dengan BUMN Perkebunan, bila siap akan ditanami sawit dan tanaman lainnya, Bila ini dilakukan insyaallah, produktif.

"Hari ini, yang terpenting Bagaimana sawah harus dialiri air, geopolitik dunia dahsyat, kekeringan dimana-mana. Harapan saya, saudara-saudara kita yang di asistansi datang ke Aceh, itu memberi susana kesejukan, sawah harus dialiri air," ujarnya menanggapi kekeringan yang kerap melanda Aceh

Senada isu teranyar terkait penemuan sumber Gas alam baru lepas pantai Aceh, juga menjadi sorotan seniman eksesentrik itu.

"Sumber daya gas yang diperbincangkan dunia internasional di Aceh, hari ini seluruh SDM, Main Power, agar bagaimana anak-anak muda kita Aceh harus di didik tentang itu, tidak boleh lalai lagi. Yang kita ingin tuju adalah bagaimana membangun kemandirian Aceh hingga dipandang jadi martabat tinggi pemerintah Indonesia" Tegas Rafli

Pakta perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia sudah 17 tahun. Kedua pihak sepakat mengakhiri konflik bersenjata pada 15 Agustus 2005.

Konflik sejak 1976

bertujuan memerdekakan Aceh dari Republik Indonesia, dimana menurut GAM, Indonesia tidak adil terhadap Aceh.

Ribuan orang Aceh menjadi anggota GAM, dikirim ke Libya secara bergelombang untuk menjalani latihan militer. Mereka yang mendapatkan pelatihan di Libya adalah orang-orang pilihan dan punya semangat juang tinggi. Tak terhitung pasti jumlah ribuan lebih korban meninggal, hilang, dan cacat permanen, bahkan kerugian fisik maupun non fisik akibat perang masa itu di Aceh.

Kontak tembak terjadi saban hari kala itu. Hingga puncaknya, pasca Musibah Tsunami 2004. Tepat pada 15 Agustus 2005, kedua pihak sepakat berdamai. Proses penandatanganan perdamaian dilakukan di Helsinki, Finlandia.

Kehadiran Rafli, Senin (15/08), ditutup dengan syair Wakaf Keikhlasan dihadapan PJ Gubernur Aceh Mayjend Achmad Marzuki, Wali Nanggroe Aceh PYM Malek Mahmud Alhaitar, Eks Panglima GAM Muzakir Manaf juga anggota komisi VI DPR RI, Muslim SHI.

Hadir juga Wamen ATR/BPN, Raja Juli Antoni, dan



## RAFLI

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Nanggroe Aceh Darussalam I

"Hari ini, yang terpenting Bagaimana sawah harus dialiri air, geopolitik dunia dahsyat, kekeringan dimana-mana. Harapan saya, saudara-saudara kita yang di asistansi datang ke Aceh, itu memberi susana kesejukan, sawah harus dialiri air"

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Eko Prasetyanto. Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar, Pangdam IM, Mayjen

TNI Mohamad Hasan, Kajati Aceh yang diwakili Asintel Mohamad Rohmadi, Ketua BRA, Azhari Cage, pejabat lain dan sejumlah elit lokal Aceh eks kombatan GAM.

# Dirgahayu Kemerdekaan RI **Syahrul Aidi: Daulat Ekonomi dan Politik Internasional Harus Ditegakkan**

KUTIPAN

Jakarta (17/08) — Momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-77 harus dijadikan refleksi agar Bangsa Indonesia ke depannya harus lebih mandiri dan konsisten dalam memposisikan diri baik di dalam negeri atau dunia internasional.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi MAAZAT saat diungkapkan pada Rabu (17/8/2022) jelang pelaksanaan apel kemerdekaan.

Saat ini, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diganggu oleh kehadiran Covid-19. Efeknya sangat besar dalam menjaga stabilitas dalam negeri dan peran Indonesia di mata negara lain.

"Hingga HUT RI ke-77 ini, pandemi belum juga berakhir. Pemerintah dibuat kesulitan dalam menata pembangunan. Tren negatif kita lalui walau

negara lain juga. Maka, saat yang tepat kita jadikan momentum HUT RI ke-77 ini untuk kembali mengevaluasi diri agar kedaulatan negara makin kokoh. Baik di sisi ekonomi dan politik dalam negeri dan di mata internasional," terang Syahrul Aidi.

Menjaga kedaulatan ekonomi penting bagi kita. Sebab stabilitas ekonomi mempengaruhi semuanya. Penunjukan Indonesia sebagai presidensial G20 tahun ini menandakan bahwa kita mampu untuk itu. Tapi semua itu tidak maksimal karena

kondisi saat ini memaksa kita untuk mempertahankan fundamental ekonomi.

"Rakyat saat ini menunggu kebijakan-kebijakan ekonomi yang melindungi mereka. Makin hari, rakyat makin khawatir dengan kondisi perekonomian kita. Banyak kebijakan yang saat ini membuat rakyat mengurut dada. Pasrah tapi tak rela." katanya khawatir.

Sementara itu, Syahrul Aidi juga menyoroti Indonesia dalam politik internasional. Pemerintah menurutnya belum menunjukkan peran signifikan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kegagalan Presiden Jokowi mendamaikan perang Ukraina-Rusia jadi pertanda bahwa peran kita lemah di kancah internasional.

"Selaku ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina, saya melihat pemerintah belum menunjukkan peran signifikan. Padahal Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar. Tentu ini jadi indikasi bahwa posisi kita masih lemah," tegasnya.



**Dr. H. SYAHRUL AIDI  
MAAZAT, Lc., M.A.**

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI

"Rakyat saat ini menunggu kebijakan-kebijakan ekonomi yang melindungi mereka. Makin hari, rakyat makin khawatir dengan kondisi perekonomian kita. Banyak kebijakan yang saat ini membuat rakyat mengurut dada. Pasrah tapi tak rela."

Kutuk Israel Teror Gaza dan Bahayakan Al-Aqsha Lagi,

## HNW: Pemerintah RI Harus Konsolidasikan OKI dan DK PBB

### KUTIPAN

Jakarta (07/08) --- Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengutuk keras kembali terjadinya serangan militer Israel terhadap Jalur Gaza dan pembiaran upaya ribuan ekstremis Zionis menyerbu Al-Aqsha.

Hidayat yang akrab dipanggil HNW ini menegaskan bahwa seluruh tindakan sewenang-wenang dan teror yang kembali dilakukan Israel sejak Jumat (5/8) merupakan pelanggaran berkelanjutan yang nyata terhadap HAM dan hukum Internasional.

“Dalam serangan udaranya yang terakhir, Israel sudah mengakibatkan tewasnya 6 anak-anak, 32 warga sipil termasuk salah satu pimpinan kelompok perlawanan Palestina, dan 215 warga dewasa dan anak-anak Palestina yang terluka. Serial teror kejam dan tak berperikemanusiaan ini harusnya direspons dengan

tegas dan keras oleh Indonesia dan dunia Internasional, agar tidak terus berulang, agar terorisme bisa dihentikan, agar hukum Internasional bisa ditegakkan, agar perdamaian di kawasan bisa diwujudkan,” demikian disampaikan HNW melalui keterangannya di Jakarta, Ahad (07/08).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga menegaskan bahwa serangan Israel ke Jalur Gaza kali ini semakin menampakkan wajah otoriter dan kolonialis Israel, karena sekalipun serangan Israel tak pernah berhenti, tapi kembali mengklaim bahwa serangannya sebagai operasi pre-emptive,

dan oleh banyak pakar disinyalir berkaitan dengan agenda para elit politik di Israel karena dekatnya jadwal Pemilu di Israel.

“Lebih jahat lagi kalau serangan berulang Israel di Jalur Gaza yang tidak ada pembedannya itu, dan telah menewaskan banyak warga, termasuk anak-anak dan perempuan, dan menghancurkan bangunan-bangunan sipil, disinyalir karena kepentingan elit politik Israel jelang Pemilu yang dijadwalkan bulan November 2022. Tindakan represif seperti itu selain merusak demokrasi dan menajuhkan solusi damai di Palestina, juga semakin membuka topeng jahat Israel yang selama ini mengklaim sebagai satu-satunya negara demokrasi beradab di Timur Tengah,” tegas HNW.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Jakarta II (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri) ini juga mengingatkan bahwa beriringan dengan serangan Israel ke Gaza, tindakan sewenang-wenang



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Wakil Ketua MPR RI

“Serangan Israel ke Jalur Gaza kali ini semakin menampakkan wajah otoriter dan kolonialis Israel, karena sekalipun serangan Israel tak pernah berhenti, tapi kembali mengklaim bahwa serangannya sebagai operasi pre-emptive, dan oleh banyak pakar disinyalir berkaitan dengan agenda para elit politik di Israel karena dekatnya jadwal Pemilu di Israel.

kelompok ekstremis Zionis yang hendak menyerbu Masjid Al-Aqsha pada hari ini, yang mereka klaim sebagai Hari Raya Tisha B'Av, yang oleh aparat penguasa Israel sengaja dibiarkan, justru akan makin memperburuk situasi keamanan di kawasan, dan makin

menajuhkan upaya perdamaian disana yang salah satu kuncinya adalah dengan diakuiinya Palestina sebagai negara Merdeka dengan ibukotanya; Al Quds, Yerusalem Timur tempat beradanya Masjid Al Aqsha. Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](https://fraksi.pks.id)



*Turut  
Berduka  
Cita*



Turut Berduka  
Atas Wafatnya Ananda

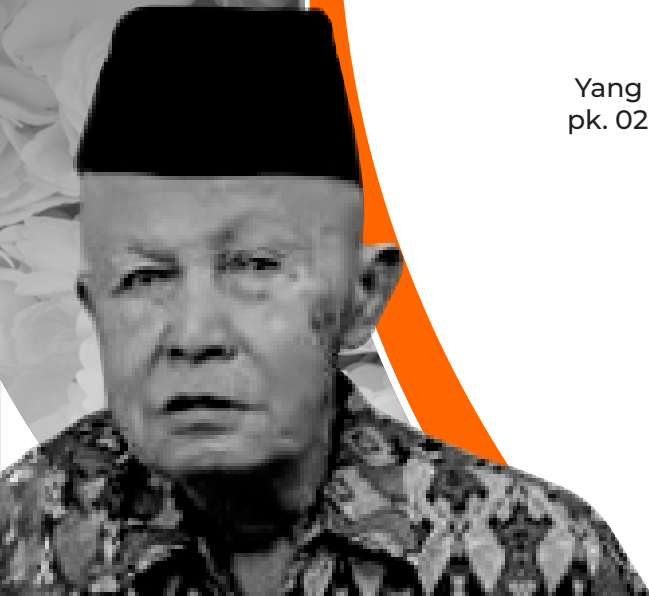
# Bapak Mardanis Sutan Tanameh

Ayahanda Gubernur Sumatera Barat  
Mahyeldi Ansharullah

Yang wafat pada Selasa 6 September 2022  
pk. 02.43 WIB di RSAM Bukittinggi Sumbar.





Semoga Allah SWT menerima  
amal ibadahnya serta  
menempatkannya di tempat  
terbaik Jannah-Nya  
Amin

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI





**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)
-  Twitter  
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/Fraksi_PKS_DPR_RI)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV_DPR_RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***